

Bangka Belitung identik dengan timah. Meskipun perdagangan timah di Bangka Belitung mengalami pasang surut, namun timah sulit dipisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Latar belakang sejarah yang telah berurat sejak masa lalu membuat daerah ini sulit berkembang ditopang oleh ekonomi lain. Sekalipun itu lada. Pola perdagangan timah dari masa ke masa dalam kurun waktu abad ke 19-20 selalu berubah menyesuaikan pemegang kekuasaan di Bangka Belitung.

Hambatan terbesar bagi para penambang kecil bukan peraturan, melainkan keberadaan bijih timah itu sendiri. Meski jumlahnya masih banyak, mineral itu kini tidak lagi berada di permukaan. Sedangkan tambang rakyat umumnya hanya dilengkapi peralatan sederhana.

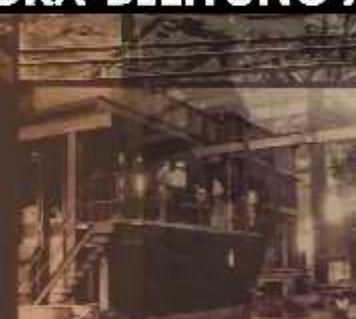
Lintas Sejarah Perdagangan di Bangka-Belitung Abad 19-20



LINTAS SEJARAH PERDAGANGAN TIMAH DI BANGKA-BELITUNG ABAD 19-20

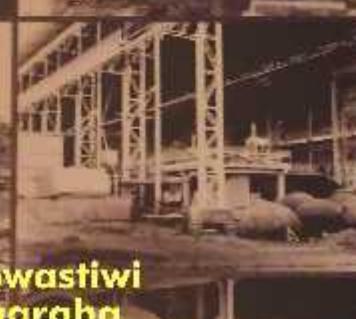
1967 - 1969

Proyek dibawah
Klöckner-Humboldt-
Industrie Aalagen GmbH.



1970 - 1971

- Masa peralihan. Dibawah teknis Indonesia.
- ...penggunaan gabungan Tanur Putar (*Rotary furnace*) dan Tanur Tetap (*Stationary Furnace*).



Anastasia Wiwik Swastiwi
Sasangka Adi Nugraha
Hendri Purnomo



BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU
WILAYAH KERJA : PROV. KEPRI, RIAU, JAMBI DAN KEPABABEL
JL. PAMUKA NO. 7 TANJUNGPINANG 29124
TELP./ FAX. : 0771-22753
POS-EL : BPNG.KEPRI@KEMDIKBUD.GO.ID
LAMARAN : KEBUDAYAN.KEMDIKBUD.GO.ID/BPNGKEPRI

ISBN 978-602-51182-1-0



9 786025 118210

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU



**LINTAS SEJARAH PERDAGANGAN TIMAH DI BANGKA-
BELITUNG ABAD 19-20**



Oleh :

**Anastasia Wiwik Swastiwi
Sasangka Adi Nugraha
Hendri Purnomo**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU
2017**

**LINTAS SEJARAH PERDAGANGAN TIMAH DI BANGKA-
BELITUNG ABAD 19-20**

Oleh :

**Anastasia Wiwik Swastiwi
Sasangka Adi Nugraha
Hendri Purnomo**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA KEPULAUAN RIAU
2017**

LINTAS SEJARAH PERDAGANGAN TIMAH DI BANGKA BELITUNG ABAD 19 - 20

Penulis :

Anastasia Wiwik Swastiwi
Sasangka Adi Nugraha
Hendri Purnomo

ISBN 978-602-51182-1-0

Editor :

Dwi Sobuwati
Nuraini

Desain Sampul dan Tata Letak :

Ardiyansyah
Novita Sari

Percetakan :

CV. Genta advertising
Jalan D.I. Panjaitan No. 4 Tanjungpinang

Penerbit :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau

Redaksi :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau
Wilayah Kerja : Prov. Kepri, Riau, Jambi dan Kep. Babel
Jalan Pramuka No. 7 Tanjungpinang
Telp./Fax : 0771-22753
Pos-el : bpb.tanjungpinang@kemdikbud.go.id
Laman : kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpbnbkepri

Cetakan Pertama : November 2017

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

Sambutan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau

Syukur Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan ke khadirat Allah Yang Maha Kuasa; karena atas bimbingan dan ridho-Nyalah buku "Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20" dapat disusun dan diterbitkan.

Sejumlah fakta terkait Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20 yang dipaparkan dalam buku ini merupakan hasil kajian peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kepulauan Riau. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil kajian dimaksud sehingga hasil akhirnya dapat tersaji dengan lugas, akurat dan dapat dijadikan sumber bacaan atau referensi kesejarahan serta sumber informasi bagi penelitian lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas (fungsi) BPNB antara lain melakukan kajian dan kemudian dikemas dalam bentuk buku serta bentuk terbitan lainnya dan disebarluaskan ke masyarakat, tidak saja untuk masyarakat lokasi kajian, akan tetapi disebarkan juga kepada masyarakat luas.

BPNB Kepri sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerja, dalam hal ini meliputi Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengkajian sejarah dan budaya, pendokumentasian nilai budaya, pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan internalisasi nilai budaya. Seluruh kegiatan yang dilakukan mengarah pada *penguatan pendidikan karakter*.

Seiring dengan visi BPNB Kepri, yaitu *menjadi pusat informasi kebudayaan lokal dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan jatidiri bangsa*, pengumpulan data dan informasi melalui kajian perlu dilakukan untuk melengkapi data dan informasi yang telah ada. Selain

dengan melakukan kajian, upaya penggalian data lainnya dilakukan melalui inventarisasi dan dokumentasi nilai budaya, perekaman peristiwa sejarah dan budaya, serta pencatatan WBTB.

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya menyambut baik penerbitan buku ini diiringi ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu. Semoga buku ini dapat berguna bagi pengenalan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan sehingga kebudayaan yang hidup dan berkembang di kemudian hari tetap berpijak pada akar sejarah dan budaya warisan para pendahulu.

Tangjungpinang, November 2017
Kepala BPNB Kepri,



Toto Sucipto

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Lintas Sejarah Perdagangan Timah di Bangka Belitung Abad 19-20”.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, selalu kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita.

Tanjungpinang, November 2017

Tim Penulis

Daftar Isi

Sambutan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Maksud dan Tujuan	3
1.5. Tinjauan Pustaka.....	3
1.6. Kerangka Teoritis.....	4
1.7. Metode Penelitian.....	5
1.8. Kerangka Penulisan	5
Bab II Gambaran Umum Penelitian	7
2.1. Kota Pangkal Pinang.....	7
2.2. Kabupaten Bangka Selatan	14
2.3. Kabupaten Bangka	18
2.4. Selayang Pandang Kabupaten Bangka Barat	24
Bab III Timah Dan Sejarah Bangka Belitung	51
3.1. Sejarah Bangka Belitung.....	51
3.2. Penemuan dan Eksploitasi Timah	64
3.3. Potensi Timah Dari Masa Ke Masa.....	72

Bab IV Pola Perdagangan	97
4.1. Konflik Timah di Bangka Belitung	105
4.2. Timah Dalam Kontrol Pemerintah	107
4.3. Tambang Inkonvensional	111
4.4. Ekspor Ilegal dan Timah Batangan	114
Bab V Penutup	117
5.1. Kesimpulan	117
5.2. Saran	117
Daftar Pustaka	

*"Inilah tempat timah terkaya yang tidak ada bandingannya di dunia.
Seluruh Pulau (Bangka Belitung)nya akan menjadi tambang timah
terbesar..."*

(Thomas Stamford Raffles, 1812)

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kajian tentang timah di Bangka Belitung adalah sesuatu yang menarik. Hal ini seiring dengan nama Bangka Belitung itu yang bermakna timah. Hal itu dibuktikan dengan tulisan di prasasti Kota Kapur dekat Sungai Mendu (Mendo), Bangka yang berangka tahun 686 M. Penambangan timah telah dimulai pada abad ke-7 di daerah ini secara rahasia sejak masa Sriwijaya.



Museum Timah di Muntok
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

Sutedjo Sujitno menyatakan bahwa pada kurun waktu antara 1596 ketika Cornelis de Houtman pertama kali datang sampai dengan

awal kedatangan VOC sekitar tahun 1602, belum tercatat adanya perdagangan timah. Akan tetapi sejak 1649 sudah ada hubungan dagang antara VOC dengan Kesultanan Palembang. Diasumsikan bahwa timah merupakan salah satu komoditi yang diperdagangkan. Akan tetapi, asal dari timah itu sendiri dirahasiakan secara ketat. Pada tahun 1668 barulah diketahui bahwa timah yang dijual Kesultanan Palembang adalah berasal dari Bangka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas penggalian timah di Pulau Bangka masih berlangsung pada masa Kesultanan Palembang. Hanya saja tetap dijaga kerahasiannya. Baru pada tahun 1709 aktivitas penambangan tersebut diketahui oleh umum melalui sebuah laporan yang penulisnya tidak dikenal. Tulisan tersebut dikutip dan dimuat dalam *Tijdschrift voor Ned. Indie* VII, bagian 4 halaman 144 tahun 1848 dalam Sutedjo Sujitno.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola perdagangan timah di Bangka Belitung ?
2. Bagaimana warisan luhur dari kejayaan timah di Bangka Belitung?

1.3. Ruang Lingkup

Pada kajian yang bertema ekonomi ini ruang lingkungnya terdiri atas batasan tempat dan waktu. Batasan tempatnya adalah Kepulauan Bangka Belitung namun tetap dikaitkan dengan wilayah-wilayah di Sumatera maupun di Indonesia. Batasan Waktunya adalah pada abad ke-19 hingga ke-20. Abad yang di ambil dengan

pertimbangan pada abad ini, Bangka Belitung merupakan wilayah yang memiliki kandungan timah terbesar di pasar dunia dan perkembangannya hingga abad 20.

1.4. Maksud dan Tujuan

Timah di Bangka pada masa sekarang dapat dikatakan tinggal kenangan. Kejayaan timah pada masa lalu menyisakan banyak peninggalan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah setempat untuk membuat kebijakan bagaimana menyikapi agar kejayaan timah tidak hanya sekedar kenangan tetapi juga menjadi sumber edukasi bagi generasi muda maupun masyarakat pada umumnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dua tulisan yang sangat representatif tentang timah di Indonesia khususnya di Bangka Belitung adalah tulisan Sutedjo Sujitno, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah (2007)* dan *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad 18-Abad 20 (2005)*. Dua tulisan itu memberi gambaran perdagangan timah masa-masa awal.

Menyimak catatan I Tsing, pengelana China yang sempat berkunjung ke Sriwijaya pada abad ke-7, memperkirakan bahwa timah di Bangka sudah dikenal sejak abad ke-4. Adapun penambangannya diduga baru dimulai abad ke-8. Sumber lain mengutip petikan surat Gubernur Jenderal Joan Maetsuyker kepada penguasa Oost Indische Compagnie tertanggal 25 Januari 1667. Dalam surat itu disebutkan bahwa kapal yang akan kembali pulang (ke Negeri Belanda) memuat 100.000 ton timah. Ada dugaan bahwa timah dari

Asia yang memasuki pasaran Amsterdam pada 1667 itu berasal dari Bangka. Cukup banyak tulisan mengenai kegiatan awal penambangan dan perdagangan timah di Bangka Belitung. Namun, catatan penulis tak dikenal—kemudian dikutip dan dimuat dalam *Tijdschrift voor Ned. Indie VIII* (1846)—tampaknya paling banyak mendapat tempat, dan dirujuk oleh para ahli. Catatan penulis tak dikenal itu menyebut angka 1709 sebagai tahun pertama penemuan timah di Bangka.

“... waktu di mana pertama kali penemuan timah di Bangka tidaklah jelas. Namun, penambangan timah yang pertama kali dilakukan adalah di wilayah Merawang, tepatnya di kampung Calin daerah Depak. Penambangan itu dilakukan atas perintah Batin Angor, yang bermula dengan ditemukannya butiran logam putih yang berserakan di tanah bekas hutan yang dibakar ketika membuka ladang...” (2007:11).¹

1.6. Kerangka Teoritis

Kajian ini masuk dalam kategori Sejarah ekonomi.² Kemunculan sejarah ekonomi bermula dari karya *Wealth of Nation*

¹ Referensi diatas menjadi “penuntun jalan” untuk menguatkan fakta pada periode abad 19-20

² Bidang Sejarah ekonomi juga merangkum berbagai aspek atau bidang berkaitan seperti perniagaan, kuantitatif, dan komoditi. Selain itu, dalam bidang sejarah ekonomi juga terdapat beberapa ciri penting dalam cara penelitiannya, seperti kemampuan membuat generalisasi, kemampuan

(1770) oleh Adam Smith dan mulai berkembang pesat dengan kemunculan konsepsi sejarah material oleh Karl Marx pada abad ke-19. Sejarah ekonomi terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah bersifat tematik, yaitu yang lebih menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi dalam sejarah. Kedua ialah bersifat paradigmatik, yaitu factor ekonomi dijadikan sebagai skema mental atau asas falsafah dalam mengkaji sejarah. Pada kajian ini, lebih bersifat tematik yang menekankan pada aspek kegiatan perdagangan timah. Dengan mengidentifikasi pola atau kecenderungan.

1.7. Metode Penelitian

Pada kajian ini, metode sejarah yang digunakan dalam merekonstruksi peristiwa pada masa lampau melalui empat tahapan kerja, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan kisah sejarah).

1.8. Kerangka Penulisan

Kajian ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Penelitian

Bab III Timah dan Sejarah Bangka Belitung

Bab IV Pola Perdagangan

Bab V Penutup

menyusun data secara kuantitatif, kemampuan membuat kajian komparatif dan mengidentifikasikan pola atau kecenderungan.

Bab II Gambaran Umum Penelitian

2.1. Kota Pangkal Pinang

Kota Pangkal Pinang adalah salah satu daerah pemerintahan kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31. Secara geografis, Kota Pangkalpinang terletak di Bagian Timur Pulau Bangka pada koordinat $106^{\circ}4'$ sampai $106^{\circ}7'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}4'$ sampai $2^{\circ}10'$ Lintang Selatan (RPJMD Kota Pangkal Pinang, 2008).

Pada awalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 Kota Pangkalpinang hanya memiliki luas wilayah 89,4 Km² dengan batas-batas wilayah pada saat itu meliputi (RPKD Kota Pangkal Pinang, 2013):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Seiring perkembangan pemerintahan dan bergabungnya Desa Selindung dengan Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, maka luas wilayah Kota Pangkalpinang menjadi 118,4 Km² dengan batas wilayah pemekaran meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

Seiring dengan tuntutan optimalisasi perkembangan kewilayahan, optimalisasi fungsi layanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan potensi wilayah Kota Pangkalpinang, maka pada tahun 2011 dilakukan penataan kembali wilayah kelurahan dan kecamatan melalui pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan baru yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang. Berikut ini data kelurahan dan kecamatan hasil pemekaran wilayah:

1. Kecamatan Taman Sari dengan 5 kelurahan, yaitu Opas Indah, Batin Tikal, Gedung Nasional, Rawa Bangun, dan Kejaksaan;
2. Kecamatan Gerunggang dengan 6 kelurahan, yaitu Tua Tunu Indah, Bukit Merapen, Kacang Pedang, Bukit Sari, Taman Bunga, dan Air Kepala Tujuh,

3. Kecamatan Rangkui dengan 8 kelurahan, yaitu Masjid Jamik, Pintu Air, Asam, Keramat, Bintang, Melintang, Parit Lalang, dan Gajah Mada
4. Kecamatan Gabek dengan 6 kelurahan, yaitu Selindung, Selindung Baru, Gabek I, Gabek II, Air Salemba, dan Jerambah Gantung
5. Kecamatan Pangkalbalam dengan 5 kelurahan, yaitu Rejosari, Ketapang, Ampui, Pasir Garam, dan Lontong Pancur
6. Kecamatan Bukit Intan dengan 7 kelurahan, yaitu Semabung Lama, Air Itam, Bacang, Pasir Putih, Temberan, Sinar Bulan, dan Air Mawar
7. Kecamatan Girimaya dengan 5 kelurahan, yaitu Pasar Padi, Batu Intan, Bukit Besar, Sriwijaya, dan Semabung Baru

Ditinjau dari kondisi topografi, wilayah Kota Pangkalpinang yang berada pada ketinggian 20–50 m dari permukaan laut dan kemiringan 0–25 persen pada umumnya memiliki kontur tanah bergelombang dan berbukit mengelompok di bagian barat dan selatan seperti Bukit Girimaya dan Bukit Menara. Sedangkan secara morfologi, daratan Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana bagian pusat kota berada di daerah yang relatif lebih rendah.

Wilayah Kota Pangkalpinang termasuk ke dalam bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa. Kota Pangkalpinang memiliki beberapa sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang di Bagian Selatan dimana keduanya berfungsi sebagai pintu keluar air menuju ke Sungai Baturusa yang berakhir di Laut Cina Selatan. Selain sungai, Kota Pangkalpinang juga masih

memiliki daerah rawa-rawa yang masih asli maupun sudah dialihfungsikan menjadi tambak atau kolam yang terletak di sepanjang Sungai Baturusa dan Selindung, bagian tengah dan hilir Sungai Rangkui, dan sepanjang Sungai Pasir Padi (RKPD Kota Pangkal Pinang, 2013).

Kondisi demografi di Kota Pangkalpinang terdiri atas percampuran banyak etnis. Dominasi struktur sosial masyarakat dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa suku Hakka yang datang dari Guangzhou, serta ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores, dan Ambon (Anonim, 2013b). Kondisi ini turut melatarbelakangi hadirnya pluralisme budaya di Kota Pangkalpinang yang tercermin pula dari keberagaman agama yang dianut penduduk Pangkalpinang, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari keenam agama tersebut, yang banyak dianut oleh sebagian besar penduduk adalah agama Islam.

Identitas etnis masyarakat Pangkalpinang adalah bagian dari masyarakat Melayu Bangka. Entitas melayu yang dimaksud adalah sebagai salah satu suku bangsa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk (Elvian, dkk., 2008). Kata Melayu pertama kali diketahui dari berita Cina tahun 644 M yang menunjukkan adanya Kerajaan Melayu Nusantara.³ Pada prinsipnya, Melayu dapat dibagi ke dalam tiga pengertian, yaitu (1) satu ras diantara ras lainnya dan

³ Lihat <http://melayuonline.com/ind/about/dig/2/pertanggungjawaban-akademis-melayu-online>

memiliki kulit coklat yang merupakan hasil pencampuran antara ras Mongol berkulit kuning, Dravida berkulit hitam, dan Aria berkulit putih; (2) suku bangsa seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Madagaskar sebagaimana tafsiran UNESCO tahun 1972; dan (3) suku atau etnis (Lutfi, 1986). Pandangan lainnya menjelaskan bahwa seseorang dianggap sebagai Melayu apabila telah memenuhi syarat beragama Islam, berbicara Bahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu, dan menetap di kawasan Melayu (Sinar, 1987). Suku Melayu bermukim di sebagian besar wilayah Malaysia, pesisir timur Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, serta Pulau-Pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia, jumlah suku Melayu sekitar 15% dari seluruh populasi yang sebagian besar mendiami daerah-daerah di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat (Suryadinata dkk., 2003).

Wilayah budaya Melayu hampir seluruhnya berada di kawasan khatulistiwa equator yang sekaligus ditandai oleh ekologi alam beriklim hujan lebat sepanjang tahun dalam dua musim angin dan penuh ditumbuhi hutan hijau. Di sepanjang pesisir pantai, terutama di muara sungai yang menjadi pelabuhan kapal perdagangan memunculkan segala kegiatan ekonomi dan pembinaan unit-unit politik kenegaraan dalam bentuk kerajaan dan kesultanan yang kemudian berkembang untuk menguasai kawasan pedalaman sebagai kerajaan Melayu. Oleh kerana kedudukan daerah Melayu tersebut banyak berada di daerah kepulauan dan pesisir, maka kebudayaan

dan peradaban Melayu menjadi amat terbuka terhadap pengaruh budaya luar atau asing dan membaaur menjadi budaya Melayu yang dinamis atau dengan istilah 'masuk Melayu'. Perpaduan berbagai unsur ini menjelma menjadi kesatuan budaya dan menjadi warna serta wajah Melayu kini (Kling, 2013).

Masyarakat Pangkalpinang mayoritasnya adalah orang Melayu yang tentu saja menganut sistem sosial kemasyarakatan sebagaimana suku Bangsa Melayu pada umumnya. Masyarakat Melayu Bangka di Kota Pangkalpinang terbuka terhadap hubungan dengan lingkungan luar sehingga dapat menerima perbedaan struktur sosial masyarakat dan mampu membaaur dalam kebersamaan hidup di dalam suatu komunitas. Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat Melayu sangat memungkinkan terjadinya akulturasi budaya, termasuk di Kota Pangkalpinang. Meskipun asimilasi budaya terjadi di Kota Pangkalpinang, budaya Melayu masih banyak dijumpai dalam keseharian hidup di kota ini. Adat istiadat budaya Melayu yang dimaksud dapat dimaknai sebagaimana termaktub di dalam Kamus Antropologi, yaitu semua konsep serta aturan-aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya orang Melayu yang menata tindakan-tindakan anggota masyarakat dalam kehidupan sosial dan kebudayaan (Kadir, 2009). Ciri kepribadian orang Melayu pada umumnya tidak lepas dari cara orang Melayu melihat dunia sekelilingnya, melihat dirinya sendiri, kesadaran agamanya, kesadaran terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, kesadarannya di tengah-tengah orang lain dan orang asing, dan sebagainya. Semua itu mencetuskan sikap dan tingkah-laku orang Melayu dalam

menghormati orang lain sesuai dengan tuntutan adat-istiadatnya. Selain itu, Suhaimi Sulaiman (2013) yang merupakan seorang tokoh adat Pangkalpinang menyampaikan bahwa Melayu juga mengandung pelambangan seperti Bunga Puteri Malu yang mengkuncup malu apabila disentuh (melayu atau menjadi layu). Filosofi ini tercermin di dalam kerendahan hati, sikap, dan tutur kata orang Melayu sehari-hari, seperti mengajak tamu untuk berkunjung ke rumahnya yang diutarakan dengan kalimat “mari mampir ke gubuk kami”. Kata “gubuk” bukanlah dalam arti yang sebenarnya karena bisa saja tempat tinggal orang tersebut adalah rumah besar dan megah. Demikianlah kiasan yang sering digunakan orang Melayu untuk melambangkan “melayu” (kerendahan hati, sikap, dan tutur katanya).



Peta Kota Pangkal Pinang
(Sumber: KePulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2011)

2.2. Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan merupakan sebuah daerah otonomi baru yang menjadi bagian dari hasil pemekaran Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka Selatan terletak di Pulau Bangka dengan luas 3.607,08 Km² atau 360.708 Ha. Secara geografis Bangka Selatan terletak pada 2° 26' 27" sampai 3° 5' 56" Lintang Selatan dan 107° 14' 31"sampai 105° 53' 09" Bujur Timur.

Bangka Selatan merupakan bagian dari daerah pemekaran dari Kabupaten Bangka yang pada saat itu merupakan bagian dari daerah tingkat II atau Kabupaten Bangka. Secara geografis wilayah Kabupaten Bangka Selatan sendiri terletak di Pulau Bangka dengan luas kurang lebih 3.607,08 Km² atau 360.708 Ha. Sementara secara administratif, wilayah Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/ kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Tengah di sebelah utara, dan sebelah barat dan selatannya berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa, serta di sebelah timur berbatasan dengan Selat Gaspar.

Jarak tempuh yang paling jauh dari Kabupaten Bangka Selatan ke berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Mentok, Ibukota Kabupaten Bangka Barat dan Sungailiat Kabupaten Bangka Induk. Sementara untuk jarak terdekat yaitu Kabupaten Bangka Tengah dimana hampir sebagian besar wilayahnya banyak yang bersebelahan dengan wilayah Bangka Tengah.

Pada tahun 2007, Bangka Selatan terdiri dari 5 kecamatan, 3 kelurahan, dan 45 desa, serta didukung sebanyak 158 dusun/lingkungan. Kemudian pada tahun 2008, banyak terjadi perubahan struktur kewilayahan daerah kabupaten, terutama pemekaran kecamatan dan desa yang dianggap penting sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan. Pada tahun 2008 terjadi penambahan 2 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pulau Besar dan Kecamatan Tukak Sadai, dan pada tahun 2012 bertambah kembali, yakni Kecamatan Pongok sehingga Kabupaten Bangka Selatan pada saat ini menjadi 8 kecamatan, diantaranya:

1. Toboali
2. Air Gegas
3. Payung
4. Simpang Rimba
5. Lepar
6. Pulau Besar
7. Tukak Sadai
8. Pongok

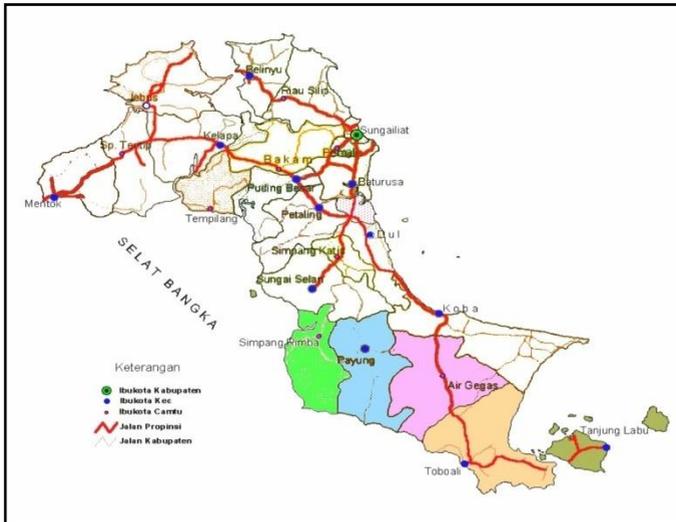
Dari 8 kecamatan tersebut, Toboali menjadi ibu kota kabupaten. Dilihat dari luas wilayah yang membagi Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Toboali merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 41 persen dari total wilayah Bangka Selatan, dan Kepulauan Pongok sebagai kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan hanya 2 persen dari total wilayah Bangka Selatan.

Pada dasarnya, Kabupaten Bangka Selatan merupakan sebuah daerah multi suku yang memiliki berbagai macam latar

belakang budaya yang sangat kaya. Ada beranekaragam suku yang mendiami daerah ini, diantaranya Melayu, Cina, Jawa, Batak, Bugis, Palembang dan lainnya. Keselarasan dan keserasian masyarakat Bangka Selatan selama ini terjalin baik dalam sosialitas masyarakatnya yang sangat ramah dan terbuka. Bahkan tidak jarang harmonisasi antar etnis tersebut juga terjalin dalam sebuah proses akulturasi budaya yang sangat unik dan menarik karena antar budaya saling melebur. Antara masyarakat berlatar belakang sosial budaya berbeda tersebut juga terjalin sikap toleransi yang tinggi dimana masing-masing diantara mereka tetap hidup berdampingan serta sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Proses akulturasi berlangsung harmonis dan seimbang, walaupun ada gejolak yang berbentuk konflik, hal tersebut masih dalam skala kecil dan tentunya dapat diatasi tanpa adanya hambatan berarti yang bisa mengganggu persatuan dan soliditas lokal pemerintah dan masyarakat sekitar (Rendy, 2010).

Agama/kepercayaan yang dianut masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan mayoritas Islam. Pada tahun 2011, prosentase pemeluk agama Islam berjumlah 96,60 persen, agama Kristen Protestan 0.90 persen, Kristen Katolik 0.37 persen, Budha 0.67 persen, Hindu 0.19 persen, serta kepercayaan Konghucu sebanyak 1.26 persen. Mengacu pada monografi Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012, jumlah penduduk Bangka Selatan berjumlah 183.486 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 51 orang per KM². Untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 95.195 jiwa, dan untuk perempuan sebanyak 88.291 jiwa

Posisi dan kondisi daerah Bangka Selatan memberikan keuntungan geografis yang sangat potensial untuk memberikan peluang besar bagi pembangunan daerah, khususnya di berbagai sektor strategis yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Posisi kabupaten ini begitu strategis karena terletak dekat dengan lalu lintas ke luar Pulau Bangka, khususnya ke Jakarta. Kabupaten Bangka Selatan juga sangat potensial untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa mengingat dekatnya aksesibilitas dari dan menuju Pulau Bangka.



Peta Kabupaten Bangka Selatan
(Sumber: Bangka Selatan Dalam Angka 2012)

2.3. Kabupaten Bangka

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas lebih kurang 3.028,794 Km² atau 3.028.794,693 Ha. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka terdiri atas 8 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sungailiat
2. Kecamatan Pemali
3. Kecamatan Riau Silip
4. Kecamatan Belinyu
5. Kecamatan Puding Bear
6. Kecamatan Mendo Barat
7. Kecamatan Bakam
8. Kecamatan Merawang

Menurut Schmidt-Ferguson dalam Elvian (2011), Pulau Bangka beriklim tropis type A (sangat basah) dengan jenis vegetasinya adalah hutan hujan tropis. Variasi curah hujan untuk Kabupaten Bangka antara 43,6 mm hingga 356,2 mm tiap bulan untuk tahun 2011, dengan curah hujan terendah pada bulan Agustus dan curah hujan tertinggi pada bulan April.

Suhu rata-rata daerah Kabupaten Bangka berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang menunjukkan variasi antara 26°C hingga 28,1°C. Sedangkan kelembaban udara bervariasi antara

73 hingga 87 persen pada tahun 2011. Sementara intensitas penyinaran matahari pada tahun 2011 rata-rata bervariasi antara 33,8 hingga 89,0 persen dan tekanan udara antara 1008,5 hingga 1010,2 mb. Musim penghujan dan kemarau di Pulau Bangka dipengaruhi oleh 2 (dua) musim angin, yaitu angin muson barat dan angin muson tenggara. Angin muson barat yang basah terjadi di bulan November, Desember dan Januari banyak mempengaruhi bagian utara Pulau Bangkam sedangkan angin muson tenggara yang datang dari Laut Jawa yang berpengaruh pada kegiatan pelayaran di sekitar Selat Bangka yang menghubungkan Pulau Bangka dan Pantai Timur Pulau Sumatera, Selat Gaspar dan Selat Karimata yang menghubungkan Pulau Bangka dengan Pulau Belitung dan Kalimantan.

Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut:

1. 4% berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah kompleks podsolik coklat kekuning-kuningan dan litosol berasal dari Batu Plutonik Masam.
2. 51% berombak dan bergelombang, tanah berjenis Asosiasi Podsolik coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk kompleks batu pasir kwarsit dan Batuan plutonik Masam.
3. 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi podsolik berasal dari kompleks Batu Pasir dan Kwarsit.
4. 25% rawa dan beancah/datar dengan jenis tanahnya asosiasi alluvial hedromotif dan glei humus serta regosol kelabu muda berasal dari endapan pasir dan tanah liat.

Kabupaten Bangka dengan ibukotanya Sungailiat, berdiri sejak 27 April 1766 atau 7 Rabiul Awal 1186 Hijriah (Chandra, 2003). Mayoritas penduduk Pulau Bangka adalah berasal dari suku Melayu Bangka. Sebutan Melayu yang paling awal muncul sebagai nama sebuah kerajaan yang berpusat di hulu Sungai Jambi. Kerajaan ini pernah disinggahi selama 2 (dua) bulan oleh seorang pendeta agama Budha berasal dari Cina bernama I-Tsing dalam perjalanannya dari Kanton ke India pada tahun 644 Masehi (Elvian, 2011).

Pada tahun 2011, berdasarkan hasil registrasi penduduk di Kabupaten Bangka, jumlah penduduk sebanyak 297.091 jiwa. Jumlah ini meningkat 6,7% jika dibandingkan tahun 2010. Dari data yang tersedia pada tahun 2011, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka relatif sama banyak yakni penduduk laki-laki sebanyak 153.676 jiwa atau sekitar 51,7 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 143.415 jiwa atau 48,3 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3 persen.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka pada tahun 2011 relatif lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yakni bertambah 18.606 orang, sehingga pada tahun 2011 kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka 101 orang per Km². Adapun penambahan penduduk dalam kurun waktu 2009-2010 sebanyak 18.090 orang dengan kepadatan penduduk pada tahun 2010 adalah 94 orang per Km².

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat, corak masyarakat Bangka dapat dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-

jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang.

Penggalian timah terdapat dimana-mana, di seluruh daratan Pulau sampai di perairan lepas pantai, sehingga pekerjaan sebagai buruh bukan lagi merupakan masyarakat kota, tetapi juga dilakukan oleh penduduk di desa-desa dan di daerah pesisir. Tidak mengherankan jika ada karyawan tambang disamping pekerjaan mereka di Parit atau di Kapal Keruk, giat pula bercocok tanam ataupun menangkap ikan di luar jam kerjanya ataupun berdagang. Namun sejak adanya reorganisasi PT. Timah jumlah penduduk yang bekerja pada PT. Timah menjadi berkurang.

Tanah Pulau Bangka sangat cocok untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti Karet, Sahang (Lada), Kelapa, Kelapa Sawit dimana sebagian besar hasil tanaman ini diperdagangkan keluar daerah atau keluar negeri yang merupakan sumber penghidupan petani yang sangat berarti, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan usaha dalam bidang pertanian ini.

Keadaan ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial antara masyarakat petani tanaman-tanaman perdagangan ini dengan masyarakat petani ladang. Disamping itu kayanya perairan Pulau Bangka dengan berbagai jenis ikan selalu menarik kaum nelayan dari daerah-daerah lain, misalnya kaum nelayan suku Bugis. Pada mulanya mereka hanya sekedar datang pada waktu panen ikan, tetapi lama-kelamaan mereka kemudian menetap dan membaur dengan masyarakat serta membuat perkampungan sendiri.

Usaha dagang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Bangka keturunan Cina, tidak saja mereka berusaha dikota-kota, tapi juga mereka masuk ke desa-desa. Diberbagai pantai tertentu menetaplah orang-orang Cina ini yang melakukan penangkapan ikan dan beternak babi serta menanam sayur-sayuran.

Keterbukaan masyarakat Bangka akan pendatang-pendatang telah menjadikan Pulau ini bercorak heterogen. Di Pulau ini terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaaur dan berkembang. Disamping orang-orang dari suku Bugis, suku Madura, suku Butun, terdapat suku Jawa, Bali dari daratan Sumatera (Batak, Aceh, Palembang, Padang, dan lain-lain), Ambon dan sebagainya.

Dalam masyarakat yang majemuk inilah, segala gerak langkah kehidupan berkisar pada usaha pencaharian nafkah. Setiap individu tampaknya selalu sibuk dan giat bekerja. Komplek perumahan karyawan yang dibangun disekitar pertambangan yang kadang jauh terpisah dari kampung-kampung, membawa corak atau bentuk kehidupan yang lain. Tetapi hal yang nampaknya seperti pemencilan ini ternyata tidak pernah membawa pengaruh atau menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena komunikasi selalu terpelihara dengan baik.

Di samping membangun jalan-jalan, pihak perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, antara lain sekolah, listrik maupun telepon. Karena itu tidak mengherankan apabila di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan terdapat lampu listrik yang terang benderang. Namun demikian, dalam setiap lingkungan

masyarakat yang bagaimanapun coraknya, suasana tradisional masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat Bangka, terutama di kampung-kampung.

Semangat dan kegiatan gotong-royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik. Motto "Sepintu Sedulang" yang terdapat pada lambang Pemerintah Kabupaten Bangka, memberikan makna yang mencerminkan segi kehidupan sosial masyarakat Bangka yang berdasarkan semangat gotong-royong itu.

Islam merupakan agama yang dominan pemeluknya disamping penganut agama Kristen, Hindu, Budha maupun aliran kepercayaan Kong Hu Cu. Tradisi Pek Cun yang dilakukan oleh masyarakat Cina masih terus terpelihara, dimana pada hari-hari itu masyarakat Cina beramai-ramai pesiar ke pantai, dalam rangka menjalankan kepercayaannya.



PETA KABUPATEN BANGKA
(Sumber: KePulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2011)

2.4. Selayang Pandang Kabupaten Bangka Barat

2.4.1. Sejarah Kabupaten Bangka Barat

Sejarah Bangka Barat tidak terlepas dari sejarah Pulau Bangka. Pulau Bangka yang sejak dahulu telah memiliki potensi daerah, terutama timah maupun lada, menjadikannya rebutan dari satu kerajaan dengan kerajaan, diantaranya : Kesultanan Johor, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan Palembang. Kemudian, dibuka perdagangan dengan VOC tahun 1717 oleh Sultan Palembang.

Setelah itu, dengan adanya *Perjanjian Tumtang* 18 September 1811 yang menyatakan bahwa Pulau Bangka sebagai bagian dari Kesultanan Palembang, Pulau Bangka diserahkan kepada Kerajaan Inggris. Dan berdasarkan *Konvensi London* tanggal 13 Agustus 1814, Belanda kembali menerima dari kerajaan Inggris daerah-daerah yang pernah diserahkan pada perjanjian sebelumnya.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan II, gelora semangat perjuangan mewarnai daerah ini dengan berbagai perlawanan yang heroik, seperti : Pertempuran di desa Petaling yang ditandai dengan gugurnya 12 orang pejuang bangsa.

Setelah masa Revolusi Kemerdekaan II usai dan Pulau Bangka menjadi wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perdana Menteri DR. Halim Perdana Kusuma bersama rombongan menuju Bangka yang didampingi dr. Moh. Isa, Gubernur Sumatera Selatan, pada tanggal 21-22 April 1950 pemerintahan Bangka diserahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Sejalan dengan itu bubarlah

Dewan Bangka, dan ditetapkanlah Bangka- Belitung sebagai satu daerah Keresidenan.

Berkenaan dengan terbitnya UU Nomor 28 tahun 1959, maka terbentuklah Daerah Tingkat II Bangka yang merupakan pemisahan dengan Kotapraja Pangkalpinang. Kemudian pada perkembangan selanjutnya bangka sendiri telah terdiri dari 22 kecamatan.

Proses Pembentukan Bangka Barat terjadi seiring dengan era Otonomi Daerah dimana terbentuklah Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagai pemekaran dari Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka –Belitung. Pada saat itu propinsi ini masih terdiri dari dua kabupaten dan satu kota. Maka, masyarakat membentuk Presidium untuk pembentukan kabupaten dengan 3 (tiga) presidium kabupaten lainnya. Namun, propinsi ini dimekarkan menjadi tiga kabupaten pada tanggal 27 janurai 2003, dimana RUU (Rencana Undang-Undang) pembentukan kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur mendapat pengesahan DPR RI. Pengesahan tersebut dilanjutkan Pemerintah dengan terbitnya Undang-undang Nomor 05 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268), menandai terbentuknya Kabupaten Bangka Barat bersama 3 (tiga) kabupaten pemekaran lainnya dalam propinsi Kepulauan bangka Belitung dimana Bangka Barat dengan ibukota Muntok adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari

Kabupaten Bangka. Pemberian nama Kabuapten Bangka Barat ini didasari oleh letak wilayahnya yang berada di bagian barat dari Pulau Bangka.

2.4.2. Letak Geografis

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur.

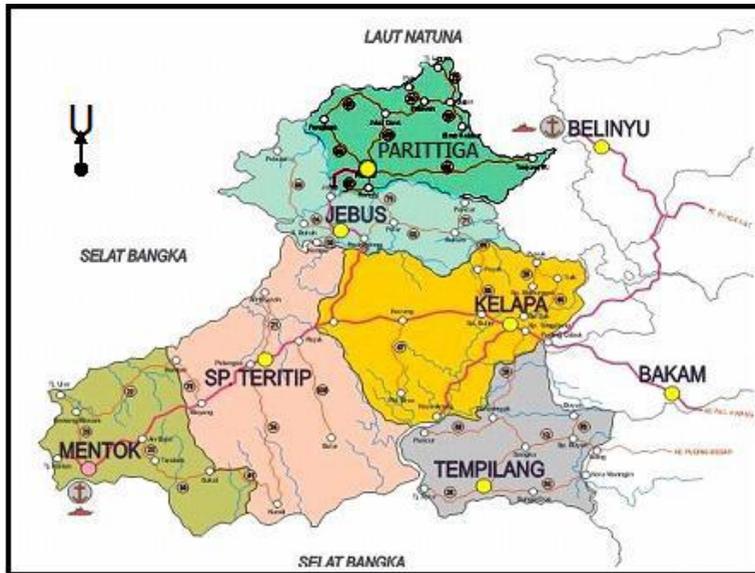
Batas wilayah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bangka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Berdasarkan pembacaan pada Peta Rupa Bumi BAKOSURTANAL skala 1 : 250.000, wilayah Kabupaten Bangka Barat secara geografis terletak di antara : 105° 00' – 106° 00' BT dan 01° 00' – 02° 10' LS. Luas wilayah daratan lebih kurang 3.065,79 Km² dengan wilayah administratif yang terbagi 6 (enam) kecamatan, 4 (empat) kelurahan dan 60 (enam puluh) desa.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Bangka Barat dekat dengan Pulau Sumatera sehingga menjadi pintu gerbang masuknya barang dan penumpang dari Pulau Sumatera yang melewati laut.

Dilain sisi dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat dalam buku yang berjudul "Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2012" disebutkan bahwa seluruh wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berada di Pulau Bangka dengan total luas wilayah lebih kurang 2.884,15 Km² atau 288.415 Ha. Wilayah daratan terbagi dalam enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa dengan luas wilayah 573,80 Km², Kecamatan Tempilang dengan luas wilayah 461,02 Km², Kecamatan Muntok dengan luas wilayah 505,94 Km² , Kecamatan Simpang Teritip dengan luas wilayah 637,35 Km², Kecamatan Jebus dengan luas wilayah 351,93 Km² dan Kecamatan Parittiga dengan luas wilayah 354,11 Km².



PETA KABUPATEN BANGKA BARAT
 (Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2012)

2.4.3. Kota Muntok Dalam Sejarah Perkembangannya

Muntok yang awalnya merupakan pusat keturunan Siantan, dengan cepat berkembang menjadi distrik multi etnis, tempat bercampurnya suku Melayu, Cina, Siam dan Koci. Mereka menempati wilayah ini dari Muntok hingga Rembut (Rambat. -Pen) dan dari Muntok hingga Tempilang.

Seorang Cina bernama Un Asing⁴ tinggal di Muntok. Karena keahliannya dalam penambangan timah dan kedekatan hubungannya dengan Ranga, ia diangkat menjadi Kapitan Cina untuk

⁴ Un Asing = Bun A Siong = Bun A Siang.

menggantikan Bong Hu But (Cung Huyut) yang telah lanjut usia. Bong Hu But adalah seorang peranakan Cina Palembang yang ditugasi oleh Sultan mencari orang-orang Cina untuk dipekerjakan di parit-parit di Bangka.

Muntok berkembang menjadi daerah multi etnis yang ramai dan makmur. Namun sejalan dengan itu, kejahatan, pencurian, perampokan di dalam negeri turut berkembang. Orang Cina banyak melakukan pencurian dan penggelapan (penyelundupan) timah. Kemakmuran di Muntok juga menarik kedatangan bajak laut Lingga.

Dari meningkatnya persaingan antara penambang Cina dan penambang asal Siam, maka satu waktu timbul peperangan antara mereka. Orang-orang Siam dibantu oleh orang Palembang. Bentrokan besar pecah di daerah air Beluh (Belo) dan menimbulkan korban besar di kedua belah pihak. Mayat-mayat dibuang di sungai yang mengalir di daerah Beluh yang sekarang dinamai sungai Sembusuk.

Dengan adanya kerusuhan ini, penyelundupan timah yang dilakukan Un Asing terbongkar, antara lain melalui wangkang-wangkang yang berlabuh di Muntok. Dia ditangkap oleh Rangga dan dikirim ke Sultan Palembang. Oleh pengadilan, Un Asing dijatuhi hukuman mati. Seluruh hartanya dirampas. Tetapi karena Un Asing sangat kaya, banyak menteri-menteri di Palembang yang menolongnya. Ia berhasil bebas mendapatkan kebebasan dari hukuman mati tetapi gagal mendapatkan hartanya kembali. Un Asing

dusir dan tinggal di hulu Palembang yaitu di suatu dusun bernama Belid.⁵ Ia dilarang menginjakkan kaki di Bangka.

Semakin meningkatnya gangguan bajak laut memaksa Palembang untuk meningkatkan keamanan dengan memperbanyak jumlah kapal-kapal yang berjaga di laut. Selama pemerintahan rangka, Muntok telah berkembang, hasil timah semakin banyak, dan kapal pedagang yang datang ke Muntok semakin ramai.

Pada masa pendudukan Kolonial menganut sistem sentralistik. Dengan struktur *Gewesten* dikepalai oleh seorang *Resident*, *Afdelling* dikepalai oleh seorang *Asistert Resident*, *Onder Afdeling* dikepalai oleh seorang *Controleur*. Pada masa ini nama Bangka muncul ke permukaan, dimana dimata Kolonial Belanda mempunyai kedudukan yang penting. Hal ini dibuktikan dengan Karesidenan Sumatera Selatan yang dipusatkan di Palembang dan Karesidenan Kepulauan Bangka Belitung yang dipusatkan di Muntok. Selain masih ada daerah yang lainnya seperti Daerah Lampung, sebagian Jambi dan Bengkulu.

Pola seperti itu bertahan hingga kedatangan fasisme Jepang di Bangka. Pada masa pendudukan Jepang, Karesidenan Bangka dikepalai oleh pemerintahan militer yang dimanakan dengan *Banka Billiton Gunseibu*. Demikian pula dengan pemerintahan setaraf dengan *Resident* digantikan oleh *Chokan*. Dan jabatan setingkat dengan *Controleur* digantikan oleh jabatan *Sodokan*, dimana semua

⁵ Muara Beliti. Muhammad Arifin Mahmud, *Pulau Bangka dan Budayanya I, II, III* (Pangkal Pinang: 1986), hlm. 46. Tidak diterbitkan.

personilnya berasal dari orang-orang Jepang. Selanjutnya dibantu oleh pegawai-pegawai yang berasal dari bumiputera seperti jabatan *Gunco* dan *Fuku Gunco*.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa daerah Muntok merupakan bagian perjuangan rakyat Indonesia.⁶ Walaupun tidak banyak tercatat dalam buku babon Sejarah Nasional Indonesia. Dimana ketika itu, pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta diserang oleh Belanda dalam aksi *Mobil Troope* (aksi *polisionil*). Dalam peristiwa itu (*class* ke-II) Presiden Sukarno, H Agus Salim dan Sultan Syahrir dibuang ke Brastagi, kemudian dipindahkan ke Prapat, dan kemudian dipersatukan dengan tawanan-tawanan yang lainnya di Muntok, Pulau Bangka. Mereka itu adalah; Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta, Ketua KNIP Mr. Ali Sastroamidjojo, Komodor Suryadarma, sekretaris negara A.G Pringgodigdo. Kecuali Sutan Syahrir yang terlebih dahulu dipanggil ke Jakarta oleh PM Belanda (pada waktu itu Mr. Dress). Dengan keadaan ini Muntok telah menjadi ajang perundingan antara Belanda dan Indonesia, demikian pernah disampaikan oleh H Romawi Latief, yang ketika itu beliau bertindak mencatat segala hasil perundingan dan konsep pemikiran dari Soekarno. Delegasi demi delegasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri datang ke bukit Menumbing untuk mengadakan

⁶ Tidak banyak yang mengetahui bahwa Muntok merupakan daerah tempat Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia diasingkan, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta pada tahun 1948.

perundingan dengan Presiden Soekarno dan Wakilnya, bersama dengan pemimpin RI yang lainnya, terutama wakil dari UNCI.

Pada masa ini ada beberapa daerah Karesidenan yang membawahi kawedanan dan kota besar. Ketika itu ada daerah Sumatera Bagian Selatan terbagi kedalam daerah Karesidenan Palembang, Karesidenan Bangka (di Muntok), Karesidenan Lampung dan Karesidenan Bengkulu. Untuk Karesidenan Bangka pusat pemerintahannya berada di Muntok. Dimana membawahi beberapa Kawedanan seperti Bangka Induk, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang, Belitung dan Bangka Barat. Bukti itu membuktikan bahwa peranan Muntok sangatlah penting ketika itu. Karena dalam tata pemerintahan di pimpin oleh seseorang yang berpangkat residen setingkat dengan kota Palembang, Lampung, dan Bengkulu. Secara terperinci Karesidenan Palembang terdiri dari 1 Kota besar dan 6 Kabupaten, Karesidenan Lampung terdiri dari 3 Kabupaten, Karesidenan Bengkulu 3 Kabupaten dan 1 kota Bengkulu, Karesidenan Bangka Belitung terdiri dari 2 Kabupaten dan 5 Kawedanan. Kawedanan itu sendiri mempunyai strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Kecamatan, sekarang ini ini dapat diilustrasikan dengan setingkat Pembantu Bupati yang membawahi beberapa kecamatan.

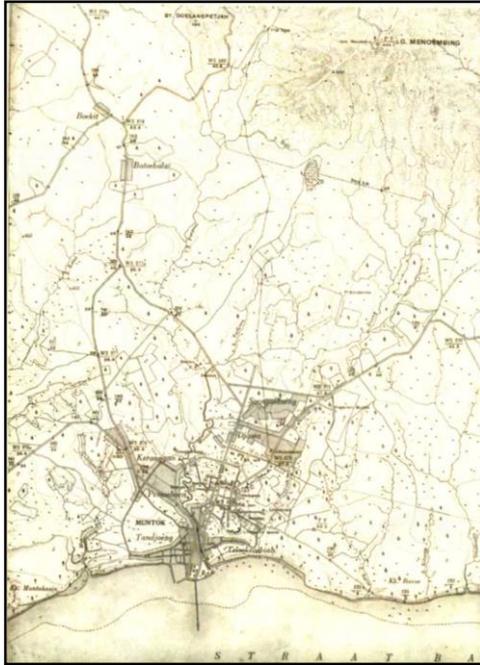
Setelah zaman perundingan selesai, Bangka mendapat perhatian khusus ditandai dengan kedatangan Perdana Menteri Dr. Halim bersama rombongan ke Bangka. Diantara rombongan itu ikut pula Dr. Mohammad Isa, Gubernur Sumatera Selatan. Kunjungan ini terjadi pada tanggal 22 April 1950, dalam peristiwa ini

diserahkannya Pemerintah Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan demikian bubarlah Dewan Bangka dan selanjutnya Kepulauan Bangka dan Belitung ditetapkan menjadi sebuah karesidenan, yang membawahi 6 Kawedanan, Pangkalpinang, Sungai Liat, Toboali, Belinyu, Muntok dan Belitung . Dengan pusat pemerintahan di Pangkalpinang, dengan status pemerintah *swapraja*, serta membawahi sebanyak 22 Kecamatan.

Pada tahun 1971, terjadi pemisahan antara pemerintahan *Swapraja* dengan kabupaten. Maka, Pangkalpinang sebagai kota administratif dan Sungai Liat sebagai pusat pemerintahan setaraf dengan Kabupaten. Pada saat itu pemerintahan di Kota Muntok secara politik setaraf dengan tingkat kecamatan.

Keadaan ini berkembang hingga terjadi isu pemekaran yang meliputi 3 Kabupaten pemekaran dan Kabupaten Induk, yaitu:

1. Bangka Induk, dengan 8 kecamatan: Sungai Liat, Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, Mendo Barat, dan Puding Besar.
2. Bangka Tengah, dengan 4 kecamatan: Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis, dan Koba.
3. Bangka Selatan, dengan 5 kecamatan: Simpang Rimba, Toboali, Air Gegas, Payung, dan Lepar Pongok.
4. Bangka Barat, dengan 5 kecamatan: Muntok, Simpang Teritip, Kelapa, Tempilang dan Jebus.



Gbr. Peta Mentok 1913
(Sumber: Suttedjo Sujitno, 2011: 159)

2.4.3.1. Kondisi Politik

Selama lebih dari seratus tahun, Muntok dikepalai oleh seorang *Resident* secara administrasi dan praktis operasional berada dibawah Pemerintahan Pusat di Batavia (Jakarta). Demikian juga dengan Belitung yang pada mulanya merupakan suatu *Asisten Residence*, berdiri sendiri langsung dibawah Pemerintah Pusat.

Atas dasar *ordonansi* tanggal 2 Desember 1933 (Staadblad. No.565), terhitung dari tanggal 11 Maret 1933 terbentuklah '*Residentie Bangka en Ouderhoregheden*' yang menetapkan *Biliton*

(Belitung) menjadi salah sebuah *Onderafdeling* dikepalai oleh seorang *Controleur* dengan pangkat *Asisten Resident* dari Karesidenan Bangka, berikut Pulau-Pulau lain disekitarnya.

Pulau Bangka sendiri terbagi dalam 5 *Onderafdeling*, yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Controleur*. Lima *Onderafdeling* kemudian menjadi Kawedanan resident Bangka yang berakhir menjelang perang dunia ke-II P. Braouwer.

Ketika kekuasaan Kolonial Belanda atas Kepulauan Indonesia direbut oleh Dai Nippon dalam tahun 1942, semasa berkobarnya perang Asia Timur Raya, Karesidenan Bangka-Belitung diperintah oleh Pemerintah Militer yang dinamakan '*Bangka Biliton Gunseibu*'. Pemerintah Administrasi menurut sistem pemerintah Belanda diteruskan, dengan mengganti nama/istilah saja, yaitu dengan istilah-istilah Jepang dan/atau Indonesia.

Demikian Residence menjadi '*Chokan*' dan *Controleur* menjadi '*Sodokan*'. Namun disamping petugas-petugas Jepang diangkat pembantu-pembantu bangsa Indonesia seperti '*Gunco*' dan '*Fuku Gunco*'.

Pada waktu tentara Jepang mulai terdesak di kawasan Bangka Belitung dalam perang Asia Timur Raya dalam peperangan melawan sekutu, barulah di Bangka dibentuklah semacam DPRD, yang dinamakan Bangka *Syu Sangikai*, yang diketuai oleh Masyarif Datuk Bendaharo.

Setelah Jepang ditaklukkan oleh Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kemudian diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan 17

Agustus 1945, atas inisiatif tokoh-tokoh di Sumatera Selatan dibentuklah Pemerintahan yang Otonomi Sumatera Selatan dibawah pimpinan Gubernur Militer. Dan, Pulau Bangka termasuk didalamnya, dimana pimpinan pemerintahan dipegang oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, bekas ketua *Bangka Syu Sangikai*, dengan gelar Residen yang dibantu oleh seorang Asisten Resident dan seorang *Controleur* yang diperbantukan.

Letnan Guverneur General Nederland Indie mempergunakan kekuasaannya menjadi daerah otonom dengan membentuk Dewan Bangka Sementara (*Voorlopige Banka Raad*) dengan surat keputusannya tanggal 10 Desember 1946 nomor 8 (Stbld. 1946 nomor 38). Dewan Bangka sementara ini merupakan lembaga pemerintahan tertinggi dalam bidang otonomi, dibuka dengan resmi pada tanggal 10 Februari 1947, dengan ketua diangkat Masyarif Datuk Bendaharo Lelo sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari 16 orang.

Sepuluh bulan kemudian 'Dewan Bangka Sementara' ini ditetapkan menjadi 'Dewan Bangka' yang tidak bersifat sementara lagi, dengan surat keputusan Lt. GG *Ned. Idie* tanggal 12 Juli 1947 nomor 7 (Stbld. 1947 nomor 123). Dilantik tanggal 11 November itu juga. Setelah Masyarif meninggal, diangkatlah Saleh Amad, Sekretaris dari Dewan tersebut sebagai ketua.

Dalam bulan Januari 1948 Dewan Bangka bergabung dengan Dewan Riau dan Dewan Belitung dalam suatu Federasi Bangka dan Belitung dalam suatu federasi Bangka Belitung Riau (BABERI) yang disahkan oleh Lt. GG. *Ned. Indie* dengan surat tanggal 23 Januari

1948 nomor 4 (Stbld. 1948 no.123), yang kemudian disahkan menjadi salah satu Negara Bagian dalam pemerintahan federal RIS. Hal ini ternyata tidak berlangsung lama, dengan keputusan Presiden RIS No.141 tahun 1950, Negara bagian ini disatukan kembali dalam Negara RI, sehingga berlaku UU Nomor 22 tahun 1948 dalam wilayah ini.

Pada tanggal 21 April 1950, datanglah ke Bangka Perdana Menteri Dr. Halim beserta rombongannya yang terdiri dari 18 orang diantaranya Dr. Mohd. Isa – Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 22 April bertempat di Karesidenan diserahkan pemerintahan atau Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan demikian bubarlah Dewan Bangka dan pemerintah setempat dipimpin oleh R. Soemardjo yang ditetapkan pemerintah RI sebagai Resident Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang. Pada waktu itu Bangka sendiri terdiri dari 5 wilayah kawedanan, masing-masing Pangkalpinang, Sungailiat, Belinyu, Muntok dan Toboali, dan 13 wilayah Kecamatan. Sebagai Bupati pertamanya adalah ditunjuklah R. Soekarta Martaamadja. Penetapan Bangka sebagai daerah otonomi kabupaten didasarkan atas UU darurat no.4, 5 dan 6 tahun 1956.

Dalam rangka penyesuaian dalam UU nomor I tahun 1957, tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka ketiga UU Darurat itu digantikan dengan UU No.28 tahun 1959. Undang Undang inilah kemudian disebut sebagai dasar hukum pembentukan daerah tingkat II Bangka. Dan, jelaslah pemisahan Kabupaten Bangka dengan Kotapraja Pangkal Pinang.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 13 dan 18 UU No. 28 tahun 1959. Daerah Tingkat II Bangka mempunyai wilayah sebagaimana diatur dalam *staadblaad* 1947 No.123 dan tidak termasuk wilayah kotapraja Pangkalpinang yang diatur wilayahnya dalam surat keputusan Direktur BB tanggal 30 September 1959 No.216/Btg.

Dengan dasar di atas, maka Ibukota Kabupaten Bangka masih menumpang dalam wilayah Kotapraja Pangkalpinang sejak tahun 1956, dan adanya pusat Pemerintahan Daerah Tingkat II dalam satu wilayah yang sama, menimbulkan banyak permasalahan baik dalam pelaksanaan, tugas-tugas umum pembinaan kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembangunan, sehingga dipandang perlu adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Bangka. Dengan pemintahan itu diharapkan tidak hanya memungkinkan untuk mengembangkan kedua daerah otonomi secara lebih baik dan lebih sehat, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan asas *dekonsentrasi* dimana dua daerah tersebut tidak hanya bersifat otonomi tetapi juga sekaligus adalah merupakan dua wilayah administrasi.

Akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang mendapat dukungan dari berbagai pihak disusunlah rencana pemindahan, yang mendapat restu dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Dan, secara Yuridis formal pemindahan tersebut kemudian disahkan oleh Pemerintah Pusat, dimana secara nyata keluarlah peraturan Pemerintah pusat, dimana secara nyata keluarlah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1971 tanggal 19 Februari 1971, yang menetapkan Kota Sungailiat sebagai Ibukota Kabupaten Bangka.

Kemudian oleh DPRD Kabupaten Dati II dengan Perda Nomor 02 tahun 1982 tanggal 6 Februari 1971 ditetapkan sebagai hari jadi kota Sungailiat sebagai Ibukota Kabupaten Dati II Bangka.

Pada awal mulanya aspirasi politik masyarakat dalam hal pemekaran semula diusulkan hanya menjadi dua Kabupaten Pemekaran dan Kabupaten Induk, akan tetapi karena terjadi tarik menarik kepentingan tentang lokasi ibukota Kabupaten Bangka Selatan, kemudian oleh atas hasil musyawarah semua pihak, baik dari masyarakat yang bersangkutan DPRD Kabupaten Bangka maupun dari Pemda Kabupaten Bangka, maka Kabupaten Bangka yang direncanakan dimekarkan menjadi tiga kabupaten pemekaran dan kabupaten induk, yaitu :

1. Kabupaten Bangka (Induk), yang meliputi 8 kecamatan yaitu Sungailiat, Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, Mendo Barat, dan Puding Besar dengan Ibukotanya di Sungailiat.
2. Kabupaten Bangka Barat, yang meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Kelapa, Tempilang, dan Jebus, dengan Ibukota di Muntok.
3. Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi 4 kecamatan yaitu Pangkalan Baru, Sungai Selan, Simpang Katis dan Koba dengan ibukota di Koba.
4. Kabupaten Bangka Selatan yang meliputi 5 Kecamatan yaitu : Simpang Rimba, Toboali, Air Gegas, Paung dan Lepar Pongok dengan Ibukota di Toboali.

Beberapa alasan yang mendasari keinginan rakyat Bangka didalam mengadakan pemekaran daerah Kabupaten, diantaranya adalah:

1. Dalam peraturan mengenai pemerintahan Daerah yang berlaku saat itu (UU No.22 tahun 1999), terdapat kemungkinan yang besarnya untuk pembentukan daerah Kabupaten Baru apabila memenuhi berbagai persyaratan. Oleh karena itu, sesuai dengan UU tersebut maka, suatu wilayah dapat mengajukan usulan pemekaran menjadi kabupaten baru.
2. Tuntutan masyarakat di tingkat bawah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah, yaitu dengan semakin pendeknya birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh jasa publik.
3. Adanya keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya alam dan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang terdapat di wilayahnya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan atas pengesahan Undang Undang DPR RI pada tahun 2003, yang mengatur pembentukan 4 Daerah Tingkat II Provinsi Bangka Belitung (yang salah satu Daerah Tingkat II itu adalah Kabupaten Bangka Barat dengan Ibukota di Muntok), maka, secara resmi Muntok tidak lagi bernaung di Kabupaten Bangka melainkan identitas sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat.

Guna meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur negara, Kabupaten Bangka telah menerobos kedepan dan merupakan daerah yang pertama di Indonesia yang pertama-tama menyelenggarakan sendiri secara murni penjenjangan Sepada/Adum, yang mendapatkan penghargaan khususnya dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini dikemudian hari dilanjutkan pula dengan mengadakan sistem penjenjangan Sepala/Adumla.

Untuk bidang transportasi secara umum dapat dikatakan bahwa perhubungan yang berjalan selama ini Kabupaten Bangka sangat memadai. Untuk Kabupaten Bangka mempunyai sarana perhubungan yang komplit dengan tersedianya fasilitas perhubungan darat antar daerah, laut maupun udara yang sudah dikenal sejak dahulu.

Khususnya perhubungan darat dan laut dapat dikatakan sangat lancar karena fasilitas perhubungan ekonomi antara Bangka dengan bekas provinsi induknya yaitu Sumatera Selatan relatif lancar. Yaitu dengan menggunakan jalur Muntok dengan *Boom Baru*. Bahkan, dalam beberapa tahun kedepan ini juga akan dibangun dari Tanjung Kelian ke Tanjung Siapi-api di Muara Sungsang. Nantinya akan diperkirakan hubungan ini hanya akan memakan waktu perjalanan 1,5 jam saja. Dampaknya akan memperlancar sistem distribusi barang-barang dari Palembang ke Muntok yang akan dilanjutkan ke beberapa daerah. Untuk beberapa tahun kedepan Kota Muntok sendiri memungkinkan untuk dibangun adanya galangan kapal. Hanya

menunggu sentuhan dari investor mau datang dan membangun kota ini.

Selain itu, dengan adanya Muntok sebagai Kabupaten yang sejajar dengan daerah lainnya, memungkinkan kedepan dapat membangun dan mengembangkan komoditas daerah tersebut seperti adanya timah dan lada atau sahang. Demi meningkatkan kesejahteraan dan harkat martabat kota Muntok itu sendiri. Demikian juga didalam pelayanan publik masyarakat dapat dilayani di Muntok itu sendiri, tidak harus datang ke Pangkal Pinang yang jaraknya menempuh perjalanan darat selama 3,5 jam.

2.4.3.2. Kondisi Sosial Budaya

Prinsip Sepintu Sedulang merupakan adat istiadat masyarakat Kota Muntok, yang merupakan satu bagian dari satu kesatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prinsip tersebut merupakan warisan dari nenek moyangnya yang mencerminkan suatu kehidupan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan prinsip gotong royong yang nampaknya masih bertahan. Semboyan ini dipandang sangat tepat, karena sesungguhnya dari tiap-tiap rumah dikeluarkan dengan rasa ikhlas, bahkan disertai dengan rasa bangga, sedulang makanan dan minuman yang dibawa ke Surau dan Masjid, ataupun yang dibawa ke Balai Pertemuan untuk dinikmati bersama-sama. Biasanya adat sepintu sedulang ini dilakukan pada hari-hari besar agama Islam. Juga pada hari pemilihan kepala desa, lurah atau penghulu. Bahkan pada dewasa ini, dilakukan pada saat pejabat tinggi daerah maupun pusat sedang berkunjung ke desa-desa maupun tamu-tamu terhormat lainnya.

Pada hari itu, kaum wanita akan disibukkan oleh adanya urusan dapur, untuk menyiapkan makanan dan minuman yang dipulangkan untuk dihidangkan. Dari nasi sampai kelauk pauknya sampai penganan-panganan (kue-kue) dan minuman atau bahkan apabila sedang musimnya, buah-buahan pun turut dihidangkan seperti buah rambutan, mangga, cempedak, manggis, dan durian. Dan, kaum pria lah yang membawa dulang-dulang itu ke tempat yang telah ditentukan, setelah beduk atau talak dibunyikan. Peristiwa penting yang dipandang paling ramai adalah pada saat diadakannya 'sedekah kampung' (sedekah mengetam padi). Pada saat inilah dapat dikatakan tidak sebuah bumbung rumahpun, baik yang berasal dari orang kaya atau miskin, yang tidak terlibat dalam keramaian itu. Bahkan dibeberapa daerah, peristiwa ini akan diikuti dengan kemeriahan dengan pernikahan massal atau sunatan (khitanan) massal. Kadang-kadang terdapat sampai belasan pasang pengantin dan puluhan anak disunatkan. Menurut catatan, pernah terjadi sebuah kampung terdapat 25 orang pasang pengantin sekaligus. Dimasa kini kegiatan itu disamping dimeriahkan oleh adanya kesenian tradisional setempat, juga dimeriahkan oleh adanya kesenian orkes melayu yang biasa disebut dengan orkes dangdut. Dan, karena faktor ekonomis dan kepraktisan, dewasa ini masyarakat juga menggunakan organ tunggal. Hal ini biasanya ditandai dengan mulai dihiasnya pintu gerbang, rumah-rumah dihias, dibuatlah telor-telor yang berwarna-warni.

Tamu boleh saja singgah dirumah manapun, meskipun tidak ada pengantinnya atau anaknya yang disunat. Bahkan kadang-kadang

para tamulah yang kewalahan menerima undangan makan dari kiri dan kanan tetangga.

Disinilah adat gotong royong masyarakat Muntok yang tampak menonjol. Setelah melakukan upacara pernikahan, masing-masing pengantin diarak bersama-sama keliling kampung, diiringi dengan bunyi tetabuhan seperti rebanaan, musik dan band. Anak-anak yang disunatkan kadang-kadang juga ikut diarak keliling kampung dengan menggunakan tandu, di atas kursi yang khusus dibuat untuk maksud tersebut (untuk di Pongok, Kab. Bangka Selatan adalah pengantin yang ditandu). Meskipun perhelatan dan keramaian dilakukan berasama-sama namun adat perkawinan, yang lazim berlaku di daerah-daerah lain tetap dijalankan.

Upacara akad nikahpun kadang-kadang dilakukan beberapa hari dengan dilaksanakan keramaian. Penentuan hari perkawinan tergantung dari permufakatan masyarakat sekampung yang biasanya bertepatan dengan hari sedekah kampung. Keramaian dan kemeriahan berlangsung semalam suntuk. Pada malam hari diadakan pertunjukkan kesenian rakyat misalnya 'campak' pencak silat atau tari-tarian lainnya. Seperti tari kecupus, tari Daik, tari Serimbang, tari Tigel dan sebagainya. Tarian Campak digemari masyarakat di desa-desa, dilakukan oleh lelaki dan perempuan dengan berpantun bersahutsahatan, sambil menari, yang diiringi biola dan tawak-tawak (gong).

Tari rakyat ini sangat mengasikan, sehingga berlangsung sampai jauh malam. Tari Kecupus adalah tarian rakyat yang indah, dilakukan oleh muda-mudi (bujang-gadis) dengan menari berpasang-

pasangan menurut irama nyanyian seorang biduan/biduanita yang diikuti oleh bunyian musik gendang panjang dan tawak-tawak.

Pakaian yang digunakn biasanya adalah pakaian adat baju kurung yang berwarna biru dan kain songket bagi wanita, baju teluk belanga dan ketokong (semacam daster dengan ujungnya mencuat kemuka seperti paruh burung), atau dengan kopiah resam bagi sang pria. Adat lain yang patut dicatat adalah bersumbul yang dilakukan oleh bujang dan gadis. Dimana bujang dan gadis sambil duduk bersila berhadap-hadapan saling bersuap-suapan baik panganan maupun buah-buahan. Dalam peristiwa seperti inilah antara bujang dan gadis akan menemukan jodohnya. Tarian lainnya seperti rodak dikenal untuk memberikan penghormatan kepada para tamunya.

Penduduk di Kota Muntok masih menggunakan bahasa Melayu. Jadi dapat dikategorikan dalam rumpun Melayu. Jadi tidaklah terlalu sulit bagi pendatang untuk menangkap pembicaraan orang Bangka. Yang dinamakan bahasa daerah atau dialek Bangka tak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan yang berasal dari unsur serapan sedikit disana-sini.

Pada umumnya perubahan itu terletak pada pengucapan vokal 'A' (terakhir) yang adalanya berubah ucapan menjadi 'E' atau 'O' ataupun 'E', sehingga misalnya siapa menjadi 'siape', atau 'siapo' ataupun 'siape'. Hal itu dapat digunakan untuk menunjukkan adakalanya seorang itu berasal dari Bangka bagian Barat, atau bagian Utara, bagian tengah ataukah bagian Selatan.

Bahasa yang dapat digolongkan menjadi bahasa khas orang daerah Muntok, seperti digunakan oleh penduduk Bangka Barat, dengan berciri pengucapan vokal 'A' berubah menjadi 'E', seperti bahasa Melayu yang dipergunakan di Malaysia. Konon menurut sejarah orang Muntok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada kurun abad ke-18.

2.4.3.3. Kondisi Ekonomi

Secara garis besarnya corak penghidupan dan mata pencaharian masyarakat kota Muntok dibagi kedalam beberapa sumber antara lainnya, sebagai pekerja pada PT. Timah yang biasa disebut sebagai karyawan tambang, bertani, sebagai nelayan baik dalam sistem perikanan darat maupun laut dan berdagang yang terkonsentrasi pada pusat kota.

Secara alamiah penggalian sistem tambang di hampir dapat disaksikan di seluruh daratan sampai di perairan pada pantai. Sehingga, pekerjaan sebagai buruh bukan lagi merupakan hanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan di Kota Muntok saja, tetapi juga dilakukan oleh penduduk di kawasan pedesaan dan pesisir pantai. Sehingga tidak mengherankan jika ada karyawan tambang disamping pekerjaan mereka di Parit atau di Kapal Keruk, giat pula bercocok tanam ataupun menangkap ikan diluar jam kerjanya ataupun melakukan aktifitas perdagangan. Namun, sejak adanya reorganisasi PT. Timah Tbk, sejumlah penduduk yang bekerja pada PT. Timah Tbk menjadi berkurang.

Masyarakat Muntok secara turun temurun mengembangkan tanaman karet, sahang (lada), kelapa, dan yang terakhir kelapa sawit

dimana sebagian besar hasil tanaman ini diperdagangkan keluar daerah atau keluar negeri, yang merupakan sumber penghidupan petani yang sangat berarti, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan usaha dalam bidang pertanian ini.

Disamping itu perairan di Kabupaten Bangka Barat kaya akan berbagai jenis ikan yang selalu menarik bagi nelayan dari daerah lain. Adapun, faktor alamiahnya adalah di sepanjang pantai sebelah Barat Pulau Bangka di tumbuhi oleh adanya tanaman mangrove yang sangat disukai oleh habitat ikan dan sejenis biota laut. Selain itu, di depan Kota Muntok terdapat Muara Sungai Musi dengan hutan mangrovenya di Muara Sungsang. Sebagai daerah pertemuan air laut dari Selat Bangka, Sungai Musi dan Selat Gaspar, menjadikan daerah itu kaya oleh adanya makanan yang dicari oleh ikan laut dan biota laut. Sehingga banyak dihuni oleh berbagai ikan laut yang berasal dari bermacam-macam jenis. Profesi nelayan ini banyak dilakukan oleh orang Melayu sendiri, etnis Cina, dan Bugis. Pada mulanya etnis Cina dan Bugis ini hanyalah sekedar datang pada saat musim panen ikan saja. Tetapi kelamaan mereka kemudian menetap dan membaaur dengan masyarakat serta membuat perkampungan sendiri.

Karena bukan merupakan daerah dengan padang rumput yang baik, maka untuk kebutuhan daging hewan ternak bagi masyarakat, hewan sapi sembelihan didatangkan dari Madura, Bali, Sumbawa, Lombok maupun daerah tetangganya Sumatera Selatan. Namun, beberapa tahun terakhir ini masyarakat Muntok sudah mulai melakukan budidaya ternak hewan sendiri. Permintaan akan hewan ternak ini akan meningkat tajam pada bulan-bulan Idul Fitri dan Idul

Adha, maka kebutuhan akan daging hewan itu semakin meningkat. Hal ini kemudian mejadi daya tarik bagi masyarakat etnis dari Madura untuk mengadu nasib sebagai pedagang ternak sapi di Muntok dan sekitarnya, disamping bercocok tanaman sayur mayur dan palawija terutama tanaman jagung.

Usaha dalam bidang perniagaan biasanya dilakukan oleh etnis Tionghoa, dimana secara mereka terkonsentrasi pada pusat-pusat keramaian kota. Namun, dalam kenyataan di lapangan etnis ini juga merambah sampai ke pelosok-pelosok desa, di seluruh Kota Muntok. Juga di beberapa tempat mereka ini, mereka juga melakukan aktifitasnya sebagai penangkap ikan, beternak babi, dan menanam sayur mayur.

Keterbukaan masyarakat di Kota Muntok telah menjadikan kota ini bercorak heterogen. Dimana berbagai suku bangsa, membaaur dan berkembang. Disamping orang-orang yang berasal dari Bugis, Madura, Jawa, Buton, Ambon, Bali dan orang-orang yang berasal dari Sumatera daratan seperti Aceh, Sumatera Utara, Padang dan Palembang.

Dalam masyarakat yang majemuk inilah, segala langkah kehidupan berkisar pada usaha pencaharian nafkah. Setiap individu tampaknya selalu sibuk dan giat dalam bekerja. Kompleks perumahan karyawan yang dibangun disekitar pertambangan yang terkadang terletak jauh dan terpisah dari kehidupan perkampungan, membawa corak atau bentuk kehidupan yang lainnya. Tetapi, hal yang tampaknya seperti pemencilan ini ternyata tidak pernah membawa

pengaruh atau menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena komunikasinya selalu terpelihara dengan baik.

Disamping membangun jalan-jalan, pihak perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, antara lain sekolah, listrik maupun telephon. Karena itu tidak mengherankan apabila di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan terdapat lampu listrik yang terang benderang. Namun demikian, dalam setiap lingkungan masyarakat yang bagaimanapun coraknya, suasana tradisional masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat Bangka, terutama di kampung-kampung.

Semangat dari kegiatan gotong royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik. Moto 'sepintu sedulang' yang terdapat pada lambang Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan makna yang mencerminkan segi kehidupan sosial dan kemasyarakatan daerah tersebut dalam semangat kegotong royongan.

Pada waktu kemajemukan masyarakat dan terpeliharanya semangat kegotong royongan telah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang mendalam. Sepanjang perjalanannya daerah itu tidak pernah terdapat tindakan-tindakan yang mengarah kepada SARA meskipun diketahui disamping banyak etnis-etnis yang mendiami daerah itu, juga terdapat berbagai macam aliran agama dan kepercayaan.

Untuk masyarakat keturunan etnis Tionghoa melakukan tradisi yang tidak kalah meriahnya misalnya perayaan tahun Imlek.

Pada saat itu juga berbaur antara masyarakat Kota Muntok yang berasal dari etnis Melayu dan masyarakat keturunan etnis Tionghoa, dimana masyarakat Melayu datang dan ikut merayakan tahun baru Imlek. Begitu pula saat masyarakat Melayu Muslim merayakan hari besar Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat etnis Tionghoa juga mendatangi rumah-rumah masyarakat muslim untuk menyampaikan ucapan selamat.

Disamping itu, kota Muntok akan dipadati lagi ketika pada perayaan bulan ziarah kubur bagi leluhur mereka. Perayaan ini biasanya disebut dengan perayaan *Ceng Beng*, dimana oleh masyarakat yang berasal dari etnis Tionghoa dimanfaatkan sebagai ajang reuni antara perantauan dari luar kota dan warga etnis Tionghoa yang menetap di Kota Muntok.

Dari segala macam tertib sosial tetap terpelihara dengan baik. Dan, malahan dari kondisi sosial ekonomi dan budaya seperti yang diuraikan, dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan rasa persatuan dan kesatuan serta untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Bab III Timah Dan Sejarah Bangka Belitung

3.1. Sejarah Bangka Belitung

Pulau Bangka adalah Pulau besar yang di kelilingi oleh banyak Pulau-Pulau kecil, menyimpan banyak cerita sejarah dan peradaban yang besar sejak zaman dahulu. Letaknya yang strategis dengan kekayaan alam yang melimpah sejak pertama kali mampu direkam oleh catatan sejarah membuktikan bahwa Pulau Bangka adalah Pulau yang bernilai historisitas tinggi.

Sebagai bagian dari sejarah yang besar, runtutan peristiwa yang pernah terjadi yang berkaitan dengan daerah ini juga menjadi perdebatan. Tidak saja perdebatan berkaitan dengan sejarah asal mula secara geografis, tetapi juga interaksi masyarakat didalamnya yang diperdebatkan oleh para peneliti dan tetua masyarakat didalamnya.

Sejarah Bangka, Pulau Bangka adalah suatu Pulau yang terdapat di samping timur Sumatra, Indonesia dan terhitung dalam lokasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Bangka terletak pada posisi 1°-30'-3°-7' Lintang Selatan dan 105°-45'-107" Bujur Timur memanjang dari Barat Laut ke Tenggara ± 108 Km. Sejarah mengungkapkan bahwa Pulau Bangka pernah dihuni oleh orang-orang Hindu pada abad ke-7. Pada masa Kerajaan Sriwijaya Pulau Bangka termasuk Pulau sebagai daerah taklukan dari kerajaan yang besar itu.

Demikian pula Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram tercatat pula sebagai kerajaan-kerajaan yang pernah menguasai Pulau Bangka. Tetapi pada masa-masa itu Pulau Bangka sedikit sekali mendapat perhatian orang, meskipun letaknya sangat strategis. Walaupun ditemukan oleh orang-orang Eropa, namun Pulau tersebut tetap hanya merupakan sebuah embel-embel Pulau Sumatra yang tidak ada artinya karena Pulau itu tidak menghasilkan rempah-rempah sebagaimana diperlukan. Oleh karena itu diterbengkali oleh orang-orang yang berkuasa saat itu, maka Pulau Bangka menjadi sasaran bajak laut (lanun), sehingga menimbulkan banyak malapetaka dan penderitaan bagi penduduk saat itu.

3.1.1 Asal-Usul Nama Bangka

Nama Bangka disebut-sebut juga dalam berbagai catatan asing, seperti misalnya catatan Tionghoa, Portugis, Belanda, Inggris, serta dokumen-dokumen Kesultanan Palembang-Darussalam dan Kesultanan Banten. Dari catatan-catatan sejarah itu, diperoleh suatu gambaran bahwa Pulau Bangka merupakan sebuah Pulau yang cukup kaya. Dengan hasil bumi (lada) dan hasil tambang (timah). Kedua hasil ini merupakan komoditi penting pada masa Kesultanan. Selain itu letaknya cukup strategis di lintas pelayaran antara Jawa, India, Asia Tenggara daratan, dan Tiongkok. Sebagai sebuah tempat yang memiliki sejarah yang cukup panjang, tentu banyak ditemukan peninggalan budayanya, baik yang berupa bangunan, maupun benda-benda hasil budaya.

Dalam berbagai publikasi dipertengahan abad 20, Pulau ini ditulis dengan ejaan "*Banka*". Kemudian, seorang ahli tambang senior Cornelis de Groot mengusulkan untuk menulis nama dengan ejaan "*Bangka*". Berikut adalah penamaan Pulau bangka:

A. Mo-Ho-Hsin

Asal-muasal nama Bangka oleh I-Tsing disebut Mo-Ho-Hsin, lokasinya di Kota Kapur, tetangga Sriwijaya. Kota Kapur berada di pantai Selat Bangka, berhadapan dengan delta sungai Musi. *Moho* berasal dari kata Sanskerta yaitu *moha* yang berarti "bingung" atau "lingung". Berdasarkan pengertian itu, sehingga kata bangka dihubungkan dengan istilah tua bangka yang berarti orang yang sudah tua dan linglung.

B. Vanka, Wangka

Pulau Bangka berasal dari kata wangka (*vanca*) yang berarti "timah" dalam bahasa Sanskerta, karena wilayah ini memang kaya barang tambang timah. Nama "*Wangka*" muncul pertama kali bersama dengan nama "*Swarnabhumi*" dalam buku sastra India Milindrapantha yang ditulis abad ke 1 SM. Swarnabhumi diidentifikasi sebagai Pulau Sumatra, maka kuat dugaan bahwa yang disebut "*Wangka*" adalah Pulau Bangka. Loius-Charles Damais, dalam bukunya Epigrafi dan Sejarah Nusantara, mempertegas bahwa Bangka berasal dari kata wangka (*vanca*).

C. Bangkai

Pulau Bangka dalam sejarah Dinasti Ming (1368-1643) disebut Ma-Yi-dong atau Ma-yi-Tung. Ma-yi-dong konon terletak disebelah barat Pulau Gao-lan atau Pulau Belitung. Istilah ma-yin-dong

merupakan julukan para pedagang Arab untuk Pulau Bangka. Kata itu berasal dari kata mayit, bahasa halus dari kata bangkai. Menurut pendapat umum, "bangkai" yang dimaksud adalah bangkai kapal yang banyak kendas atau pecah karena karang yang memenuhi bagian timur Pulau ini.

D. Wangkang

Pendapat lain mengatakan nama Pulau Bangka berasal dari kata *waka* atau *wangkang* yang berarti jung/kapal Tiongkok, yang banyak pecah dan tengelam disekitar Pulau Bangka.

3.1.2 Bangka Pada Masa Pleitosen

Pleistosen adalah masa antara 1.808.000 hingga 11.600 tahun yang lalu. Disebut juga zaman es ketika temperatur global 15°C lebih dingin dari masa sekarang (zaman kauter). Saat itu Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan tergabung menjadi satu dengan Asia daratan. Di zaman Pleistosen terjadi dua peristiwa geologi penting yaitu zaman glasial (ditandai meluasnya lapisan es di kedua kutub bumi) dan zaman interglasial (zaman es kembali mencair). Penjelasan geologi tersebut diperjelas dengan hasil pemetaan goemorfologi oleh Obdey pada tahun 1954. Ia menyimpulkan bahwa pada zaman Sriwijaya, Bangka dan Belitung masih tersambung dengan Kepulauan Lingga, Riau, dan Semenanjung Malaya. Penemuan geraham gajah *Elephas Sumatranus* oleh F. Martin dilapisan endapan timah di Bangka pada tahun 1804 memperkuat pendapat bahwa Bangka masih menjadi satu dengan Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, dan daratan Asia pada masa

Pleistosen. Seiring waktu, daratan ini pecah menjadi Pulau-Pulau kecil dan selat-selat sempit yang dangkal.

3.1.3 Bangka Pada Awal Sejarah

a. Prasasti Kota Kapur

Salah satunya adalah sejarah tentang asal usul Kota Kapur adalah ditemukannya bukti sejarah berupa prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 Masehi. Sampai saat ini, satu-satunya tempat yang mempunyai bukti tertulis tertua di Pulau Bangka dan bertarikh bahwa di Bangka telah ada hunian adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti yang ditemukan di Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka bertanggal 28 April 686 Masehi. Prasasti kota kapur di tulis menggunakan huruf pallawa dalam bahasa Melayu Kuno. Prasasti yang ditemukan di Sungai Menduk (daerah Bangka Barat) tersebut, berisikan 240 kata berbahasa Sansekerta yang berisi tentang peringatan kepada Masyarakat di wilayah Kerajaan Sriwijaya tentang larangan untuk melakukan pemberontakan. Peringatan tersebut jelas dibuat oleh penguasa Kerajaan Sriwijaya pada masa itu sehingga diperkirakan bahwa Pulau Bangka pada masa itu telah menjadi pusat aktivitas yang ramai. Prasasti kota kapur ini menunjukkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya atas Pulau Bangka kala itu, diperkirakan antara abad ke-6 Masehi dan abad ke-7 Masehi. Prasasti itu dibuat masa pemerintahan Dapunta Hyang, penguasa Kerajaan Sriwijaya.

Artifak ini ditemukan oleh seseorang dari Belanda bernama J.K. Van Der Meulen di tahun 1892 di daerah kabupaten Bangka, kecamatan Mendo Barat. Kemudian artifak-artifak tersebut dianalisa oleh H. Kern, seorang ahli Epigrafi, dimana ia menganggap bahwa

sriwijaya adalah nama seorang raja, karena sri mengindikasikan seorang "raja". Hingga akhirnya George Coedès (1886-1969), seorang sejarawan dan arkeolog Perancis menyatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah Kerajaan.

Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar, dan 19 cm pada bagian puncak. Isinya berupa *low enforcement* bagi orang-orang Pulau Bangka, yakni semua orang yang melawan atau memberontak terhadap Sriwijaya akan dihukum dan dikutuk.

Dalam Prasasti Kota Kapur, sama sekali tidak di sebutkan kata Bangka. Namun para ahli sejarah banyak menghubungkan Bahasa Sansekerta yang digunakan pada prasasti Kota Kapur dengan kata "*Vanca*" yang juga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Timah. Di dalam salah satu prasasti tersebut tertulis "*Vanca*" dalam huruf pallawa, yang diartikan "Timah". Dengan melihat kandungan timah yang ada di Pulau ini, maka penggunaan kata "*Vanca*" yang kemudian mengalami perubahan kata menjadi Bangka tampaknya bisa diterima dengan nalar.

Versi lain menyebutkan bahwa kata Bangka berasal dari kata Bangkai (Pendapat Mary F. Somers Heidhues 1992 dalam helbig) yang menunjukkan bahwa Pulau Bangka adalah Pulau tempat pembuangan bangkai pada masa penjajahan. Meski demikian, asal usul kata ini tidak memiliki bukti ilmiah sehingga analisis versi kota kapur diatas lebih bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan.

Secara geografis daerah Kota Kapur merupakan dataran yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka yang bermuara juga sungai-sungai Upang, Sungsang, dan Saleh dari daratan Sumatra. Di sekelilingnya, di sebelah barat, utara, dan timur masih tertutup hutan rawa pantai. Di sebelah selatan tanahnya agak berbukit-bukit. Bagian yang tertinggi disebut Bukit Besar dengan ketinggian sekitar 125 meter di atas permukaan laut. Di sebelah utara, membentang dari timur laut menuju barat mengalir Sungai Mendo yang bermuara di Selat Bangka setelah sebelumnya membelah daerah rawa-rawa.

b. Arca Wisnu

Di Kota Kapur selain batu prasasti persumpahan ditemukan juga empat buah arca Wisnu dari batu, runtunan bangunan suci, dan benteng tanah. Arca Wisnu ditemukan dalam beberapa ukuran panjang; 19,5 cm, 33 cm, dan 108 cm. Salah satu patung terbuat dari batu andesit dan yang lainnya dari batu granit. Penutup kepalanya (kuluk) mempunyai corak khusus berupa silinder. Untuk menentukan pertanggalan arca tersebut dapat dilihat dari bentuk mahkotanya. Dari penggambaran bentuk mahkota tampak dipahat dalam gaya seperti arca-arca Wisnu dari Kamboja, yaitu pada masa seni pre-Angkor. Stutterheim berpendapat bahwa arca tersebut berasal dari abad ke-7 Masehi dengan alasan karena tempat ditemukannya sama dengan Prasasti Kota Kapur yang ber-angka tahun 686 Masehi. Berdasarkan bentuk mahkota dan tempat temuannya, maka arca Wisnu Kota Kapur dapat ditempatkan pada abad ke 6-7 Masehi.

c. Lingga

Selain arca Wisnu, ditemukan juga sebuah lingga yang bentuk puncak dan badannya bulat telur, dengan garis tengahnya berukuran sekitar 30 cm. Namun bagian bawah lingga sudah hilang (patah). Menurut McKinnon, bentuk lingga yang bulat telur ini diduga berasal dari sekitar abad ke 5-6 Masehi. Dugaannya itu didasarkan atas perbandingan dengan bentuk-bentuk lingga dari India.

d. Prasasti Camundi

Jauh setelah Śrīwijaya, Pulau Bangka dan Belitung masih diperhitungkan kerajaan lain. Dalam sejarah kuno Indonesia, daerah Bangka, Belitung, sampai Kerajaan Malayu di daerah Batanghari sejak tahun 1380-an termasuk wilayah Kerajaan Singasari. Informasi tentang itu, secara tersirat telah disebut dalam Prasasti Camundi yang dikeluarkan oleh Kertanegara, Raja dari Singasari.

Data arkeologis yang ditemukan di situs Kota Kapur, dapat memberikan interpretasi bahwa pada sekitar abad ke 5-6 Masehi di Kota Kapur terdapat sebuah kompleks bangunan suci bagi masyarakat penganut ajaran Hindu aliran Waisnawa. Kompleks bangunan tersebut dikelilingi oleh tembok tanah yang panjangnya sekitar 2,5 km dengan ukuran lebar/tebal dan tinggi sekitar 4 meter. Tampaknya di beberapa tempat di lingkungan tembok tanah tersebut terdapat hunian kelompok masyarakat pendukung bangunan suci tersebut yang buktinya berupa pecahan keramik dan tembikar.

3.1.4 Bangka dibawah Majapahit

Kehadiran Majapahit di Bangka memberi arti penting dalam sejarah Bangka. Sistem Kepatihan (pemerintahan) yang teratur mulai

diterapkan dan tapal batas kekuasaan ditetapkan. Majapahit mengirim ekspedisi ke Bangka dua kali, yang pertama dipimpin oleh Gajah Mada dan yang kedua dipimpin Tumenggung Dinata. Namun tidak ada yang dapat memastikan tarikh kedua-duanya dan nama raja Majapahit yang memerintah pengiriman.

Orang pertama yang mengenal Bangka adalah seorang pedagang Arab bernama nahkoda Sulaiman. Kapalinya singgah di pantai kaki gunung Menumbing. Sulaiman melafaskannya menumbing yang dalam bahasa Arab berarti "tempat berulang datang".

Setelah kembali ke Pulau Jawa (dari Pulau Bangka) Sulaiman menghadap penguasa Majapahit, mengabarkan perihal Pulau Bangka dan masyarakatnya. Tertarik dengan laporan Sulaiman, Raja Majapahit mengirim ekspedisi ke Pulau Bangka dipimpin oleh patih Gajah Mada. Sulaiman ikut mendamping kembali ke Bangka. Rombongan ini mendarat di daerah kaki gunung Menumbing. Untuk mengetahui situasi dan kondisi Gajah Mada menuju puncak gunung Menumbing. Dari ketinggian Gajah Mada melihat adanya lapangan terbuka dari kejauhan, menandakan daerah pemukiman. Di lapangan terbuka terlihat sebuah tunggul sisa pohon besar yang ditebang, yang disebut punggur oleh masyarakat setempat. Tempat pemukiman tersebut kemudian dinamakan Desa Punggur. Seseorang kemudian diangkat untuk memimpin masyarakat disana.

Di samping mengangkat kepala desa, Gajah Mada juga menetapkan batas, menetapkan tata-cara pemerintahan, meninggalkan piagam daun lontar dan sepotong tembaga berbahasa

Arab dan bertulis huruf Jawa sebagai simbol pengukuhan. Setelah perjalanan singkat itu rombongan Gajah Mada kembali ke Jawa.

Bertahun-tahun sudah ditinggal rombongan Majapahit, masyarakat Bangka berkembang lebih maju dengan mengikuti tatanan kemasyarakatan yang sudah diajarkan. Tempat, gunung dan sungai sudah bernama, diambil dari nama manusia, binatang, ikan, pohon, serta warna. Pulau Bangka ditinggalkan terbengkalai oleh Majapahit. Tidak pernah ada utusan Majapahit yang datang dalam masa yang panjang. Akhirnya Majapahit mengutuskan pangeran Tumenggung Dinata untuk meninjau kembali. Rombongan pangeran datang melalui sungai Bantilan dan meneruskan jalan darat sampai kampung Mendo (Menduk) dan Kampung Jeruk. Di Mendo, dipilih seorang menjadi kepala kampung, dan diberi gelar Patih Tali. Di kampung Jeruk diangkat kepala kampung dengan gelar Patih Panjang Jiwa.

Tumenggung Dinata pun berlayar kembali ke Jawa dan menyerahkan wewenang kepada kedua patih itu. Selanjutnya Bangka sepenuhnya diatur oleh orang Bangka sendiri. Kepatihan Jeruk dipengang oleh Patih Raksa Kuning dibantu Hulubalang Selangor. Kepatihan Mendo dipengang Patih Ngincar, dan Depak dibawah patih Kembar, dibantu Layang Sedap, Mengandu, Mangirat, dan Sekapucik.

Pada masa Kerajaan Majapahit tahun 1293, Pulau Bangka sempat dijadikan sebagai basis pertahanan dengan maksud memantau tingkat kekuasaan Sriwijaya yang semakin melemah pada saat itu. Dibawah pimpinan Hayam wuruk, yang kala itu kekuasaannya

mencakup hampir seluruh kePulauan nusantara, memanfaatkan Bangka sebagai pusat pemantauan kekuatan terhadap Sriwijaya, namun pada masa Sriwijaya dan Majapahit, potensi sumber daya alam tidak terlalu di expose, karena kemungkinan besar, pada masa dua kerajaan itu tidak mengetahui tentang besarnya potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Bangka, sehingga kemudian ditinggalkan dan menjadi sarang perompak yang ganas. Diperkirakan sekitar abad XV. Pada awal tahun 1600-an, terdapat pasukan yang datang dari minangkabau, yang kala itu dipimpin oleh Sultan Johor, merubah kondisi Pulau Bangka, terutama dalam bidang keamanan dan keagamaan. Walaupun, pada awalnya, pasukan Panglima perang tuan sarah dan raja alam Harimau Garang hanya bermaksud menumpas para perompak yang mendiami Pulau Bangka pada waktu itu, namun lama kelamaan mereka mengembangkan Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa Islam mulai masuk ke Pulau Bangka pada awal tahun 1600-an.

3.1.5 Bangka di bawah Johor dan Minangkabau

Kerajaan Johor dan Minangkabau memainkan peran penting dalam Islamisasi di Bangka, khususnya ketika berkuasa di Bangka. Tuan Syarah (dari Johor) menjadi raja Bangka Kota dan menyebarkan ajaran agama Islam. Sedangkan Alam Harimau Garang (dari Minangkabau) menjadi raja di kota Beringin dimana ia mengembangkan tata tertib bermasyarakat sesuai ajaran Islam. Sejak berlangsungnya penguasaan Johor dan Minangkabau maka terjadilah percampuran antara adat Jawa dan Melayu. Secara keseluruhan, kepemimpinan Pulau Bangka berada dibawah kesultanan Johor. Tuan Syarah memimpin Bangka dengan sukses. Ia membawa kebahagiaan

dan kemakmuran bagi penduduknya. Ketika Tuan Syarah wafat, ia dimakamkan di Bangka Kota. Makamnya disebut sebagai Keramat Tuan Syarah.

Sepeninggalan Tuan Syarah, Raja Alam Harimau Garang menempati Kota Waringin didampingi Patih Raksa Kuning dan Hulubalang Selangor. Maka Pulau Bangka kemudian berada dibawah Minangkabau. Pada masa pemerintahan Minangkabau, Gunung Maras meletus, menghamburkan bebatuan dan tanah, dan membinasakan perkampungan dan penghuninya. Ketika Raja Alam wafat, ia dimakamkan di Kota Waringin yang disebut Makam Keramat Garang.

3.1.6 Bangka di bawah Kesultanan Banten

Datang sekelompok orang dengan sebuah kapal dari Banten berlabu di Bangka Selatan dengan keperluan melengkapi bekal pelayaran. Mereka bertemu dengan penduduk Bangka di dekat kampung Sukal dan mendengar cerita riwayat Pulau Bangka dari penduduk setempat. Ketika mereka tiba kembali di Banten, pengalam awak kapal terdengar oleh sultan Banten. Setelah mempelajari cerita mereka, sultan Banten paham bahwa Bangka pernah berada dibawah kerajaan Majapahit dan Mataram dimasa lalu. Sultan kemudian mengirim utusan ke Bangka untuk lebih lanjut. Mereka adalah Pangeran Penambahan Serpu dan seorang bupati bernama Nusantara. Setelah tiba di Bangka, masyarakat memberi jalan kepada Bupati Nusantara dan sultan untuk memerintah di Pulau Bangka. Bupati Nusantara menjadi pemimpin di Bangka dan berjanji kepada masyarakat untuk memilih orang Bangka sebagai patih dan batin.

1 orang patih di Punggur distrik (Mentok) dibantu 5 batin.

1 orang patih di Jebus dibantu 3 batin.

1 orang patih di Panji dibantu 5 batin.

1 orang patih di Jeruk dibantu 9 batin.

1 orang patih di Mendo dibantu 5 batin.

1 orang patih di Balar dibantu 5 batin.

1 orang patih di Pakuk dibantu 5 batin.

Piagam sebagai tanda pemberian kekuasaan diberikan kepada para patih tersebut kecuali patih yang berasal dari Jeruk, Punggur dan Mendo. Mereka memakai piagam yang pernah didapatkan dari patih Gajah Mada. Bupati Nusantara kemudian menetapkan batas-batas wilayah kekuasaan tiap patih. Bupati Nusantara memerintah Bangka dengan gelar "Raja Muda".

3.1.7 Bangka di bawah Kerajaan Palembang

Hampir bersamaan dengan masuknya Belanda ke Indonesia pada awal tahun 1600-an, Pulau Bangka mulai dikuasai oleh Kerajaan Banten dengan mengangkat Bupati Nusantara untuk memerintah Bangka dengan pusat kekuasaan di Bangka Kota. Sultan Abdurrachman yang memerintah Kesultanan Palembang (1662-1706) pada masa itu meminang Puteri Bupati Nusantara di Bangka Kota dan ketika Bupati nusantara wafat. Setelah Bupati Nusantara wafat, kekuasaan jatuh ke tangan putri tunggalnya dan oleh karena putrinya telah dikawinkan dengan sultan Palembang yaitu Abdurahman (1659-1701), kemudian kekuasaan tersebut beralih ke kekuasaan Kesultanan Palembang. Maka dengan sendirinya Pulau Bangka dan sekitarnya

menjadi bagian dari kesultanan Palembang. Sultan Abdurahman kemudian wafat pada tahun 1707, Ratu Anom Komaruddin adik kandung Ratu Muhamad Mansur kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Palembang, menggantikan kakaknya (1715-1724). Walaupun kakaknya telah berpesan sebelum wafat, supaya putranya Mahmud Badaruddin menyingkir ke Johor dan Siantan, sekalipun secara formal sudah diangkat juga rakyat menjadi Sultan Palembang. Sepeninggal Sultan Abdurrachman, keturunan sultan pecah dalam perselisihan dan mengakibatkan putera Sultan yang bernama Ratu Muhammad Badaruddin meninggalkan Palembang. Pada Tahun 1735, Kesultanan Palembang mengadakan perjanjian dengan penguasa Hindia Belanda tentang penjualan timah. Isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Belanda memonopoli perdagangan timah di Bangka. Kekuasaan atas Pulau Bangka selanjutnya diserahkan Mahmud Badaruddin kepada Wan Akup, yang sejak beberapa waktu telah pindah dari Siantan ke Bangka bersama dua orang adiknya Wan Abduljabar dan Wan Serin.

3.2. Penemuan dan Eksploitasi Timah

Penemuan timah pertama kali di Pulau Bangka memiliki beberapa versi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Versi tahun 1707

Horsfield dalam Heidhues mengatakan bahwa timah dengan mudah terlihat ketika penduduk setempat melakukan pembakaran ladang-ladang untuk ditanami oleh penduduk setempat. Logam timah tampak meleleh ketika penduduk melakukan pembakaran.

- Versi tahun 1709

Orang yang di anggap memperkenalkan penambangan timah di Pulau Bangka adalah orang-orang Johor yang memiliki garis keturunan Cina yang beragama Islam dan juga merupakan kerabat Kesultanan Palembang

- Versi tahun 1711

Pada tahun ini juga disebutkan bahwa adanya kedatangan seorang Cina bernama Oen Asing (Boen Asiong) yang melakukan penambangan timah di Kampung Belo Mentok, orang ini pula yang melakukan berbagai macam gerakan pembaruan dalam penambangan timah, memperkenalkan penambangan timah dengan penggunaan mesin, teknik perapian untuk membakar timah yang lebih efisien dan melakukan standarisasi bentuk dan berat timah.

Orang-orang Johor dan Siantanlah yang pertama menggali timah di Pulau Bangka, karena pangalaman mereka yang sudah didapatkan di Semenanjung Malaka. Dengan ditemukannya timah (sekitar tahun 1710) mulailah Bangka disinggahi oleh segala macam perahu dari seluruh Asia dan Eropa. Bukti adanya orang Johor dan Siantan ini adalah keberadaan makam bangsawan Melayu di Mentok.



Makam Bangsawan Melayu di Mentok
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

Perusahaan-perusahaan penggali timah pun sangat maju, sehingga sultan Palembang mengirim orang-orang ke Semenanjung dan negeri Tiongkok untuk mencari tenaga-tenaga ahli. Pada tahun 1722 VOC mengadakan perjanjian yang mengikat dengan Sultan Ratu Anom Kamaruddin dari Palembang untuk membeli timah secara monopoli. Dimana menurut laporan Van Haak perjanjian antara pemerintah Belanda dan Sultan Palembang berisi:

Sultan hanya menjual timahnya kepada kompeni.

Kompeni dapat membeli timah sejumlah yang diperlukan.

VOC mulai melakukan kecurangan dan pelanggaran janji yang menyebabkan ketegangan dan sikap permusuhan. Pada tahun 1811 dalam masa pertukaran kekuasaan dari Belanda ke tangan Inggris Sultan Mahmud Badarudin mengadakan serangan terhadap kantor VOC yang berkedudukan di Palembang dan semua orang VOC mati terbunuh. Hal ini mengakibatkan Inggris mengadakan pembalasan

dan dan menangkap dan membunuh Sultan Badaruddin. Sebagai gantinya diangkatlah putranya, Najamuddin yang kemudian dipaksa menyerahkan Pulau Bangka Belitung kepada Inggris (1812). Dengan itu berakhirilah kekuasaan Kerajaan Palembang di Kepulauan Bangka Belitung.

Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahaudin (1774-1803), Bangka merupakan pemasok timah terbesar di Asia. Teknologi penambangan timah yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa, membuat produksi timah bertambah tinggi. Penjualan kepada VOC rata-rata 20.000 pikul/tahun (1 pikul = 62,5 Kg). Sejalan dengan majunya teknologi penambangan dan bertambahnya permintaan pasar, bertambah banyak pula produksi timah dari Bangka. Beberapa kota yang dibangun oleh koloni penambang timah, misalnya Mentok, Sungai Liat, dan Toboali. Kota-kota ini dapat dikatakan merupakan kota tua yang dibangun oleh penambang-penambang Tionghoa. Setelah timah ditemukan pada abad ke-17, membuat Bangka mendapatkan kekayaan dan terkenal sebagai penghasil Timah terbesar di Indonesia. Sekarang meski masih ditambang namun tidak sebanyak seperti dahulu.



Memasuki Kota Mentok
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

3.2.1 Sebelum Indonesia Merdeka

Belanda pertama kali mendarat di Nusantara tepatnya di Banten Pulau Jawa pada tahun 1596 dibawah pimpinan Cornelis de Houtman. Cukup lama setelah itu Belanda baru melirik Pulau Bangka sebagai salah satu daerah potensial penghasil timah. Ketika itu daerah ini masuk pada kekuasaan Kesultanan Palembang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa antara Kesultanan Palembang dengan Hindia Belanda telah mengadakan perjanjian tentang pengolahan hasil alam di Pulau Bangka, dan hasilnya adalah Belanda memonopoli Timah dan sebagai gantinya, Belanda akan melindungi Kesultanan Palembang. Sebuah catatan, kontrak ini diadakan pada tanggal 10 juli 1668.

Setelah tahun 1722, hubungan antara Kesultanan Palembang dengan pihak Belanda memburuk dan situasi ini dimanfaatkan oleh Inggris dan Perancis mengalahkan Belanda. Pada waktu itu, pihak

Inggris dan Prancis masing-masing dipimpin oleh Lord Minto dan Thomas Stanford Raffles, sementara Kesultanan Palembang ditinggal wafat oleh Sultan Mahmud Badaruddin yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II. Masuknya Inggris mendapat perlawanan keras dari Kesultanan Palembang, dan pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Inggris. Dan dengan terpaksa, Kesultanan Palembang kemudian mengeluarkan pernyataan yang intinya menyerahkan kekuasaan atas Pulau Bangka dan Belitung kepada Inggris.

Inggris memulai penguasaan terhadap Timah pada tahun 1812-1816, yang pada saat itu sempat mengganti nama Bangka dengan *The Duke Of York* dengan ibukota Mentok yang diganti dengan nama Minto. Nama Minto sendiri diambil dari Nama Lord Minto. Namun, pada tahun 1814, terjadi penandatanganan *Traktat London* yang mengakibatkan Inggris harus menyerahkan atau mengembalikan daerah yang telah direbut dari Belanda sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 april 1827.

Pada awal Oktober 1819, pasukan Belanda dibawah pimpinan Kapten Laemlin menyerang pasukan pertahanan Depati Bahrin di Bangka Kota. Tetapi Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan hebat Depati Bahrin dan pasukannya. Pasukan Kapten Laemlin pun mundur ke arah Mentok. Selama perjalanan mundur menuju Mentok dan melewati perkampungan, pasukan Leamlin tidak putus-putusnya diserang pengikut Bahrin. Setelah peristiwa Bangka Kota, Depati Bahrin memindahkan pusat kekuatannya ke Kota Waringin dan Kampung Nyireh. Kemudian terjadi hal yang sangat memalukan

Belanda dalam catatan sejarahnya, yaitu Residen Smissaert tewas dalam satu sergapan yang merupakan gabungan pengikut Depati Bahrin dari Kampung Jeruk. Belanda menaruh dendam pada Depati Bahrin atas kematian Smissaert dan kekalahan di tempat lain. Oleh karena itu, Belanda menjanjikan hadiah sebesar 500 ringgit bagi mereka yang dapat membunuh Bahrin.

Pada tahun 1830 setelah Depati Bahrin Menyerah, Belanda mengangkat anak sulung Bahrin yang bernama Depati Amir sebagai pengganti. Upaya ini adalah strategi Belanda untuk memikat hati rakyat Bangka. Depati Amir membawahi daerah Mendara dan Mentadai (Merawang). Tetapi sejak awal Amir menunjukkan tidak mau diperintah Belanda. Hal lain yang menambah kerisauan Belanda adalah Depati Amir ternyata mahir menghimpun pengikut untuk membangun kekuatan. Dalam laporan Belanda, dikatakan Amir menyusun kekuatan dengan menghimpun bajak laut, para pelarian penjahat dari Pulau-Pulau lain, dan preman-preman. Sikap perlawanan yang ditunjukkan Amir terhadap Belanda, diartikan rakyat sebagai sinyal untuk memberontak melawan Belanda. Maka Amir dan pengikutnya masuk hutan dan melakukan perang gerilya.

3.2.2 Indonesia Merdeka

Sejak terdengarnya siaran berita Indonesia merdeka putra-putra Bangka segera membenah diri menyediakan tenaga yuntuk menghadapi segala kemungkinan. Menurut surat dari Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohd. Hasan dari Bukit Tinggi, Pulau Bangka dan Belitung masuk dibawah kekuasaan Gubernur Militer Sumatera Selatan. Semua berkas anggota Syu Sangikai (DPR ala Jepang)

dijadikan anggota Komite Nasional Indonesia (KNI). Pimpinan pemerintah Bangka dipercaya kepada Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, bekas ketua Syu Sangikai dengan jabatan Residen dan wakilnya adalah Saleh Amad sebagai Asisten Residen. Para pemuka masyarakat dan bekas pemimpin Gyugun serta Heiho dengan semangat yang berapi-api pada awal bulan September 1945 membentuk suatu badan yang diberi nama "Angkatan Pemuda Indonesia" disingkat (API). Mula-mula hanya beranggotan 50 orang. Badan tersebut dicetus di suatu gedung yang terletak di jalan Jendral Sudirman (sekarang tempat kediaman Kuasa Unit Penambangan Timah Bangka).

Tanggal 29 Oktober 1945 datanglah utusan dari Palembang yang dipimpin oleh Mayor F. Manusama untuk membentuk "Tentara Keamanan Rakyat" (TKR) di Bangka. Mayor F. Manusama, A. Kamil dan Munzir Talib membentuk satu Resimen TKR di Bangka dibagi dalam tiga Batalyon, yakni: Batalyon I Pangkalpinang dibawah pimpinan Mayor H. Muhiddin dengan 3 kompi: Kompi Ismail Hasan, Kompi Darmomulyo dan Kompi Sukmadi. Batalyon II Mentok dibawah pimpinan Mayor Saparudin dengan 3 kompi: Kompi Saman Idris, Kompi Tumbuan dan Kompi Admi Husin. Batalyon III, persiapan untuk Belitung dibawah pimpinan Komandan Munzir.

Tanggal 6 Februari 1949 Presiden Soekarno dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim atas desakan BFO diangkut oleh Belanda dari Prapat (Sumatera Utara) ke Bangka dan disatukan dengan Moh Hatta dalam kamp Menumbing.

3.3. Potensi Timah Dari Masa Ke Masa

Selain dikaruniai pemandangan alam yang indah, Kepulauan Bangka Belitung juga menyimpan hasil bumi yang kaya. Kepulauan yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera, tepatnya di dekat Provinsi Sumatera Selatan, ini dikenal sebagai daerah satu-satunya penghasil timah di Indonesia. Di Bangka Belitung, selain pertanian, pertambangan timah juga merupakan sektor primer dalam struktur perekonomian masyarakat. Kegiatan penambangan timah di Bangka-Belitung sudah ada sejak lama. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda pertambangan yang masih bersifat tradisional pada era 1950-an.

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut The Indonesian Tin Belt. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt*, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan.

Penambangan di Bangka, misalnya, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812, dan di Belitung sejak 1852. Namun, aktivitas penambangan timah lebih banyak dilakukan di

Bangka-Belitung dan Singkep. Kegiatan penambangan timah di Pulau-Pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah Pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan Pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan Pulaunya merupakan area Kuasa Penambangan (KP) timah. Area penambangan terbesar di Pulau ini dikuasai oleh PT Tambang Timah, yang merupakan anak perusahaan PT Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha. Sedangkan PT Kobatin, sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25 persen sahamnya dikuasai PT. Timah dan 75 persen lainnya milik Malaysia Smelting Corporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha.⁷ Selain itu terdapat sejumlah smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang tersebar di darat dan laut Bangka-Belitung.

Ada beberapa versi penemuan timah di Bangk Belitung namun tahun 1710 dipakai sebagai tahun penemuan timah di Bangka, nama Bangka disebut-sebut berasal dari kata Sansekerta, *vanga* yang berarti timah atau timbel yang tercantum pada batu prasasti Kota Kapur dari abad ke-7. Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda atau VOC telah masuk ke Pulau Bangka pada Abad ke -17.

Timah pertama kali ditemukan di Bangka sekitar tahun 1710, hal ini membangkitkan minat dan perhatian Perusahaan Dagang

⁷Bappeda Bangka tahun 2000

Hindia Timur Belanda (VOC), mengingat permintaan timah di Tiongkok cukup besar. Tiongkok membutuhkan timah untuk membuat kertas doa, yaitu kertas timah tipis untuk persembahan dalam acara keagamaan, dan jika timah dicampur dengan logam lainnya akan menghasilkan barang-barang yang digunakan sehari-hari seperti kaca, cangkir teh, tempat lilin logam dan bejana untuk altar leluhur. Terkadang produk-produk ini diekspor kembali ke Asia Tenggara.

Pada abad ke-18 produksi timah di Guandong telah digunakan untuk mencetak uang logam, tetapi sejumlah besar uang itu mungkin dikirim ke Asia Tenggara untuk pembayaran barang-barang impor. Ketika Raffles meninjau perdagangan timah pada tahun 1812, ia mencatat bahwa praktek yang luas dari pembakaran kertas timah untuk tujuan-tujuan keagamaan akan membuat permintaan timah di Cina tetap tinggi dan terus berlanjut seakan-akan timah adalah komoditi pokok untuk konsumsi.⁸

Sementara di Eropa, permintaan untuk produk-produk Cina tumbuh pesat pada abad ke-18 dan timah terbukti menjadi media pertukaran yang tepat dalam perdagangan Tiongkok, menggantikan lada dan rempah-rempah lainnya yang nialinya hamper sama dengan perak.⁹ Timah juga mendapatkan pasarnya di India dan timah Asia mulai bersaing dengan timah dari Cornwall di benua Eropa pada akhir abad ke-17.

⁸Laporan Raffles kepada Lord Minto, Semarang, 1 Agustus 1812

⁹Ibid;

Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) terlibat dalam perdagangan timah yang telah berjalan dengan baik sejak VOC mengambil alih Melaka pada tahun 1641. Belanda memiliki keahlian menilai kualitas dan harga yang tepat dari logam, ketika mereka sebelumnya tidak terbiasa berurusan dengan berbagai macam produk alam seperti jamu-jamuan, rempah-rempah dan damar yang banyak diminta di Tiongkok, sebenarnya permintaan timah naik ketika penjualan teh dilakukan, karena teh segera dikirim ke Eropa dalam kemasan yang dibuat dari timah. Dengan dikuasainya Melaka, akan membuat Belanda mengontrol monopoli pembelian timah di Semenanjung Melaya, namun menjelang akhir abad ke-18, perkembangan politik disana, terutama persaingan VOC dengan Johor menyebabkan pengiriman timah anjlok.

Pada tahun 1700 pengiriman timah mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya wabah cacar dan perang sipil di Siam (Thailand). VOC juga menyalahkan masalah dalam memperoleh timah di Malaka kepada Sultan Johor, yang telah mengungsi ke Kepulauan Riau. Di situ ia berusaha memperlemah monopoli VOC dengan memberikan pembebasan pajak barang kepada pedagang Tiongkok, Inggris dan Denmark yang datang ke daerah tersebut.

Belanda merasa Sultan menekan para produsen timah agar mereka tidak menjual timah ke VOC, tetapi menjual kepada Sultan, sehingga timah dari wilayah Semenanjung bagian selatan melewati Melaka ke Johor-Riau, sementara timah dari daerah bagian utara Semenanjung Malaya dan Sumatera bagian timur menuju pelabuhan

Aceh. Inilah yang dihadapi VOC pada awal ke-18, permintaan timah meningkat tetapi persaingan dari kekuatan Eropa lainnya dan dari pedagang Tiongkok yang berlayar ke Asia Tenggara juga meningkat. Sementara para penguasa pribumi berusaha untuk meruntuhkan monopoli Belanda. Ditambah wabah penyakit dan intrik politik membuat pengiriman menjadi tidak pasti. Puncaknya pada tahun 1717-1722, Kaisar Tiongkok melarang perdagangan dengan Belanda. Timah kemudian ditumpuk di gudang-gudang di Batavia. Pada tahun 1722, kapal-kapal Tiongkok mulai muncul lagi di Pelabuhan Batavia. Di tahun tersebut Abraham Patras, agen VOC di Palembang menandatangani kontrak pengiriman timah Bangka dengan Sultan Palembang. Dalam waktu singkat, timah Bangka mulai berdatangan di Tiongkok dari Palembang melalui Batavia.

Terdapat sejumlah versi bagaimana timah ditemukan di Bangka. Karena kandungan bijih timah mendekati permukaan tanah, timah tidak sulit ditemukan. Laporan Horsfield pada tahun 1813 yaitu adanya laporan saksi mata tentang pertambangan di Bangka yang paling awal, mengatakan bahwa sejumlah kecil timah metalik muncul ketika sebuah lahan dibakar untuk mempersiapkan lahan garapan. Versi lain mengatakan, satu kampung terbakar dan timah logam muncul dalam debu. Kemungkinan timah telah ditemukan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Timah dapat ditemukan sebagai suatu hasil sampingan dari pengolahan besi yang telah lama dikerjakan di Bangka. Pengolahan besi sendiri telah dikenal di Bangka sebelum abad ke-18, besi menjadi salah satu produk penduduk setempat yang ditawarkan sebagai upeti kepada Sultan Palembang.

Timah yang berlimpah di Semenanjung Malaya, keberadaannya di Siam bagian selatan seiring dengan berkembangnya peradaban disana, dimana pertambangan timah mungkin telah berlangsung berabad-abad yang lalu. Pada awal ke-10, kapal Arab telah mengekspor timah dari Semenanjung Malaya. Kebanyakan timah Asia Tenggara adalah endapan, dihasilkan dari lapisan utama di batu dan di lapisan tanah sepanjang dasar sungai. Lapisan endapan timah yang dangkal, kemungkinan untuk mencapai bijih timah dilakukan dengan menggali lubang beberapa kaki ke dalam jika perlu dengan menghubungkan lubang-lubang dengan terowongan, dan membawa tanah galian dalam keranjang. Lubang-lubang tersebut masih ditemukan di masa kolonial, yang disebut dengan lubang Palembang. Lubang-lubang ini juga sering ditemukan di Semenanjung Malaya dan kemungkinan seluruhnya diperkenalkan dari sana.

Ketika dibawa ke permukaan, bijih timah dapat dengan mudah dipisahkan dari tanah dengan mencuci atau menyaring tanah di sebuah aliran sungai. Selanjutnya bijih timah dilebur. Teknik peleburan yang telah digunakan untuk besi dapat diterapkan untuk meleburkan timah. Penduduk Bangka memandang produksi logam seperti halnya mereka mengumpulkan hasil-hasil hutan, madu, lilin lebah, damar, yaitu dapat dilakukan pada saat waktu luang. Disaat barang dagangan dibutuhkan atau upeti harus dibayar, seluruh anggota keluarga dapat terlibat, laki-laki menggali dan melebur timah, perempuan dan anak-anak mencuci biji timah.

Produksi saat itu telah sangat meningkat, meskipun penyelundupan tetap terjadi, tetapi persediaan masih besar. Di tahun 1770, Sultan Palembang mendapatkan timah berserta produk lainnya dari upeti penduduk asli Bangka, Sultan akhirnya membebaskan penduduk dari kewajiban tersebut, karena ia banyak menerima timah dari penambang Tionghoa. Dalam kurun beberapa dasawarsa, para imigran Tionghoa, organisasi dan teknologi Tionghoa telah mengubah wajah Bangka. Dalam jejak diaspora manusia di muka bumi, orang-orang Tionghoa dikenal banyak terlibat dalam pencatutan ekonomi di berbagai belahan dunia. Pada setiap zaman dan tempat, mereka identik sebagai manusia gigih.

Pada abad ke-19 mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Di antara mereka banyak yang menuju ke berbagai wilayah pertambangan. Pada kurun 1840- 1850an, tambang emas di California dan Australia menjadi incaran para penambang dari berbagai benua. "Indra penciuman" terhadap tambang sendiri begitu melekat pada orang-orang Tionghoa; khususnya yang berasal dari Hakka, mereka punya pengalaman dan keunggulan dalam teknologi pertambangan. Orang-orang Hakka juga punya semacam jaringan organisasi yang apik dalam mendatangkan buruh-buruh dari daratan Tiongkok. Mereka jugalah yang mampu menguasai buruh, sehingga membuat aktivitas pertambangan dapat berjalan.

Bangka yang merupakan wilayah kandungan timah terbesar pada masa abad ke-19 mesti bersaing dengan gold rushes di Amerika dan Australia dalam hal pengadaan buruh dari Tiongkok. Karena persaingan pertambangan juga, wilayah Bangka dengan Belitung

terpisahkan oleh kepentingan politik timah pemerintah kolonial. Orang-orang Tionghoa sendiri sadar prospek keuntungan timah berada di bawah emas. Maka itu sebagaimana diungkap Mary F. Somers dalam *Bangka Tin and Mentok Pepper* (1992), reputasi jelek pertambangan di Bangka membuat kuli-kuli Tionghoa menjauh dari wilayah itu. Tapi, berkat peran para opsir dan saudagar Tionghoa yang merekrut dan membawa para kuli Tionghoa ke Bangka lalu menjualnya ke kongsi, maka aktivitas pertambangan timah secara perlahan tapi pasti makin berdenyut; meski arus kedatangannya sejak 1853-1859 mengalami fluktuasi.

Pertambangan timah pertama kali terdapat di dekat Mentok dimana keluarga Tionghoa-Muslim mertua Sultan datang bersama Sultan ke Bangka dan menetap disana.¹⁰ Ketika Oen (Boen Asiong), seorang Tionghoa meskipun bukan muslim, mulai mengembangkan pertambangan timah di Belo, sekitar 8 mil ke arah timur Mentok, ia melakukan sebuah pembaruan yang berhasil. Adapun pembaruan yang dilakukan oleh Oen antara lain:

- Memperkerjakan buruh-buruh yang mengerti teknik-teknik pertambangan (kemungkinan besar didatangkan dari Tiongkok)
- Memperkenalkan beberapa peralatan dan mesin dan penggunaan air secara tepat dan efisien
- Standarisasi bentuk dan berat batang timah.

¹⁰ Laporan Horsfield tahun 1848, menyatakan para penambang kemungkinan adalah orang Melayu atau penduduk lokal.

Kemungkinan saat pembaruan yang dilakukan oleh Oen, Sultan Palembang juga membagi area-area yang produktif di Pulau menjadi distrik-distrik pertambangan. Sebuah sumber menyatakan bahwa Sultan bertengkar dengan Oen, karena Oen menjual secara diam-diam kepada para pedagang yang mengunjungi Mentok. Ketika Oen diusir dari Pulau, banyak timbul masalah, dan para penguasa lokal meminta kepada Sultan agar Oen dapat kembali ke pertambangan. Sultan pun mengalah, membebaskan Oen dan membebaninya dengan kewajiban membangun sebuah benteng di Mentok dan sebuah gudang di Belo, serta menamakannya "Kapitan Cina", kapten bagi orang-orang Tionghoa.

Setelah Mentok dan Belo, pertambangan meluas ke bagian timur laut, dekat Belinyu, yang dikatakan telah ada sebuah perkampungan pada masa Majapahit. Meskipun pertambangan masih menggunakan jumlah buruh yang besar, teknologi yang diperkenalkan orang-orang Tionghoa menaikkan hasil produksi. Teknologi pertambangan paling awal yang dikembangkan oleh para kuli Tionghoa di Bangka adalah ciam (mengebor) yang menghasilkan kolong (lubang tambang besar).

Perwakilan Belanda Van Den Bogaart, Horsfield dan lainnya memberikan gambaran tentang teknologi Tionghoa dari awal abad ke-19, sebagai perbandingan dengan teknologi yang digubakan penduduk pribumi dan Melayu. Berikut adalah teknologi pertambangan yang mereka gambarkan:

- Teknik pelubangan. Penduduk asli menggali lubang kecil sedalam enam kaki, yang kadang dihubungkan dengan

terowongan.satu atau dua orang pria bekerja di lubang atau terowongan, mengangkat tanah berisi biji timah di keranjang untuk dicuci dan dipisahkan di sungai terdekat.seluruh pertambangan timah dikerjakan dengan metode pelubangan semacam ini oleh orang-orang asli Bangka.

- Teknik kulit. Penggalan dangkal mempekerjakan beberapa orang di daerah lereng dimana air tidak tertampung. Dengan satu alat penampungan kecil atau saluran air dibuang ke dalam. Lapisan tanah yang paling atas dibuang dalam air sampai lapisan dengan bijih timah ditemukan.
- Teknik kolong. Satu lokasi yang diperkirakan mengandung timah di dalamnya diteliti dengan sebuah bor besi yang disebut *ciam* atau *jian*. Bor ini semacam tongkat berongga yang panjangnya dua puluh kaki (sekitar 6 meter). ketika terdapat kandungan timah maka akan dibuat galian yang lebih luas lagi (mencapai 100 kaki atau 30 meter).

Penggunaan pompa dan roda untuk pertambangan kemungkinan dilakukan pertama kali di Bangka. Dalam laporannya tahun 1803, Bogaart mengatakan tentang pompa yang digerakkan oleh kincir air atau tenaga kerja ketika air tidak mencukupi. Ia juga melihat pompa timba (ember). Selanjutnya Croockewit juga menemukan sejumlah roda-roda kecil yang digerakkan pompa dalam penambangan disana, pada saat itu pompa semacam ini umum

digunakan di Bangka, hal ini menunjukkan bahwa model ini masuk ke Malaya dari Bangka.

Pada abad ke-18, di masa Oen dimana bentuk dan berat timah distandarisasi. Sebagai perbandingan, para penambang lokal sering memproduksi timah dalam bentuk kecil piramid bergergaji (*sawed-off*) yang beratnya hanya beberapa pon. Atas perintah VOC, orang-orang Tionghoa mulai membentuk timah dalam bentuk batang seberat setengah pikul atau sekitar 68 pon (sekitar 31 Kg). Para penambang pribumi, ketika mereka mencetak timah dalam bentuk batang, biasanya diproduksi dalam bentuk yang lebih kecil, sekitar sepertiga pikul beratnya. Selain perbedaan dalam teknik peleburan, orang Tionghoa mengangkut batang-batang timah dengan gerobak kayu dan menghindari lokasi terpencil dimana timah mungkin harus dipikul dalam jarak yang sangat jauh. Hasilnya metode penambangan pribumi yang tetap bertahan hingga abad ke-19 dimana skala kecil lebih menguntungkan dilokasi yang jauh dari sungai.

Pada saat Inggris menguasai Bangka dari tahun 1812-1816, mereka membawa dampak yang luas. Mereka menetapkan pola pertambangan timah yang akan berlaku di bawah kekuasaan Belanda. Bahkan banyak perubahan yang mereka lakukan sebenarnya telah disarankan oleh Van Den Bogaart dalam laporannya satu dasawarsa sebelumnya. Inggris mendapatkan Bangka ketika mereka mengambil alih Palembang dari Belanda dalam proses pengambilalihan wilayah Belanda di Asia Tenggara selama perang Napoleon. Inggris memberhentikan Sultan Mahmud Badarudin II dan menggantikannya dengan saudaranya Ahmad Najamudin, yang kemudian menyerahkan

Bangka kepada Inggris. Potensi Bangka sebagai sebuah daerah sumber timah sangatlah besar. Raffles yakin bahwa timah Bangka adalah satu komoditi yang tepat untuk pasar Tiongkok, lebih murah dari Cornwall dan lokasinya lebih dekat dengan pasar.

Meskipun masa penguasaan Inggris sangat singkat (1812-1816), namun pengaruh perubahan yang mereka lakukan dalam hal kebijakan penambangan timah sangat mendasar. Kebijakan ini bahkan selanjutnya dipakai sebagai landasan perencanaan Belanda dalam mengelola penambangan timah di Bangka. Belanda mendapatkan kembali Bangka dari Inggris berdasarkan Konvensi London (Traktat London) 1814, dimana seluruh kekayaan VOC diambil alih oleh Belanda, Bangka diserahkan kembali kepada Belanda sebagai pertukaran dengan Cochin di India. Dengan sendirinya kegiatan penambangan timah di Bangka beralih ke tangan Belanda.

Belanda kemudian mendirikan sebuah perusahaan Negara bernama *Banka Tinwinning Bedriff* (BTW). Meniru Inggris, Belanda kemudian mengangkat seorang Residen yang merangkap menjadi Kepala Perusahaan Tambang yang waktu itu berkedudukan di Mentok. Tetapi berbeda dengan Inggris di Malaya yang mengundang penanam modal dari Eropa yang menerapkan teknologi mesin, Belanda masih bertahan dengan gaya lama, meneruskan tradisi kuli Tiongkok dengan metode padat karya.

Sejak pertengahan abad ke-19 perdagangan timah internasional bergeser dari Tiongkok ke Inggris, Eropa Barat dan Amerika Utara. Kebutuhan pasar Tiongkok tidak menunjukkan

kenaikan. Dengan demikian pasar timah Asia tenggara juga bergeser. Permintaan akan timah naik dengan cepat. Konsumen timah meluas, tidak saja meliputi Negara Eropa, tetapi juga Amerika Serikat dan Australia. Penemuan minyak di Pennsylvania pada tahun 1859 dan berkembangnya industri makanan kaleng di amerika, menyebabkan permintaan timah di Amerika melonjak. Hal ini memacu Negara-negara penghasil timah di Asia Tenggara untuk memproduksi timah sebanyak-banyaknya.

Di Malaya, Inggris memberikan kekuasaan pada para pemilik modal swasta dari Tiongkok (*Tauke*), untuk menanamkan modalnya guna memperbesar penambangan timah. Pada dasawarsa akhir abad ke-19 harga timah dunia semakin melonjak, inggris mendorong pihak swasta barat untuk menanamkan modalnya di penambangan timah Malaya. Mereka datang dengan membawa teknologi modern. Namun demikian, mereka tidak berhasil menyaingi taktik bisnis Tiongkok dengan padat karyanya.

Pada tahun 1826, timah Bangka sudah dikenal luas di Eropa. Pada tahun 1847, 83% timah Bangka dijual di pasar Amsterdam. Timah Bangka sangat diminati oleh industri *tinplate* (plat timah) karena kemurniannya yang tinggi dan tidak adaandingannya. Timah Bangka pun membanjiri Amsterdam, bahkan pernah terjadi dimana 25 % kebutuhan timah Eropa dipasok oleh Bangka. Pada pertengahan abad ke-19, penghasilan utama pemerintah Hindia Belanda berasal dari kopi, urutan kedua diduduki oleh gula, sementara timah di peringkat ketiga.

Crookewit dalam laporannya pada pemerintah Belanda tahun 1850 berkesimpulan bahwa teknologi penambangan ala Tiongkok sudah berada pada ambang batas kemampuannya, dimana produksi hanya dapat dipacu dengan cara menambah tenaga kerja (kuli). Hal ini terbukti dengan adanya kemandegan produksi Bangka selama 40 tahun dari tahun 1850-1890, dimana produksi hanya berkisar antara 66.000-90.000 pikul. Keuangan jumlah produksi ini kemudian tertutupi oleh produksi timah Belitung, padahal cadangan timah Belitung lebih rendah dari Bangka.

Tahun 1850-an adalah puncak dari penambangan ala Tiongkok dengan teknologi tradisional sudah tidak mampu menjawab tuntutan pasar untuk memacu produksi, apalagi tidak dapat terpenuhinya penambahan tenaga kerja baru. Di samping itu, cadangan baru terletak pada lapisan yang lebih dalam, produktifitas kerja yang semakin merosot dan proses produksi yang semakin tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi produksi timah Bangka. Dari tahun ke tahun, angka produksi yang terus meningkat seiring permintaan konsumen timah dunia, akhirnya menggiring pada mekanisasi tambang. Kincir angin berantai yang sebelumnya mesti digerakan tenaga manusia, akhirnya digantikan mesin bertenaga uap. Pun, tungku manual berbahan bakar arang untuk melebur bijih besi akhirnya digantikan *Vlaanderen Oven* yang hemat arang serta menghasilkan logam lebih banyak ketimbang perangkat tambang milik para penambang Tionghoa.

Sampai akhir abad ke-19 penambangan timah masih tergantung pada usaha padat karya. Dengan demikian upaya

menaikkan produksi harus ditunjang dengan penambahan tenaga kerja. Pada tahun 1850 tercatat jumlah pekerja tambang 5.000 orang. Jumlah pekerja Tionghoa pada tahun 1918 mencapai 17.590 orang. Pada tahun 1920-an tercatat sekitar 72 tambang berskala besar, 190 tambang skala kecil. Produksi timah selain dari tambang, juga dihasilkan dari pengolahan *terak* (tin slag) dari peleburan timah lama yang ditemukan di banyak tempat di semua distrik.

Mengingat harga timah mengikuti kondisi pasar global, maka saat krisis melanda, lada menjadi alternatif ekonomi. Pada awal abad ke-20, penanaman lada di sekitar lokasi tambang diupayakan para kepala tambang. Para petani Tionghoa merawat secara tekun perkebunan lada, meski status kebun-kebun lada itu adalah sampingan dalam usaha pertambangan. Para penggarap kebun lada sendiri adalah mereka yang sebelumnya ditolak bekerja di tambang. Orang-orang Tionghoa mendapat berkah pemasukan di tengah krisis timah.



Gambar Perkebunan Lada di Belinyu
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

Berkah lain dari masa sulit bukan hanya dialami orang-orang Tionghoa, tapi juga perkembangan wilayah Bangka dan Belitung itu sendiri. Masalah lesunya produksi timah di Bangka berbeda halnya dengan angka produksi di Belitung yang meningkat pada akhir abad ke-19. Bagusnya sistem organisasi tambang di Belitung akhirnya berbuah kesuksesan. Bangka pada akhirnya bergantung pada Belitung. Hasilnya bukan hanya soal kuat-lesunya angka produksi dan keuntungan ekonomi, tapi turut terhapusnya politisasi tambang yang pernah memisahkan wilayah Bangka dan Belitung pada 1853. Alhasil pada 1933 ditetapkan reunifikasi Belitung sebagai bagian dari Keresidenan Bangka. Kondisi ini juga yang memengaruhi bertambahnya populasi orang-orang Tionghoa hingga awal abad ke-20.

Sekitar 80-85% produksi timah berasal dari tambang Tionghoa. Kontribusi tambang sunda dan Jawa masing-masing 2 tambang atau 1% kontribusinya. Kapal keruk mulai beroperasi di Bangka pada Agustus 1923 dan hanya berkontribusi 10%. Ini menunjukkan bahwa di Bangka banyak ditemukan cadangan berskala kecil, sehingga cukup ditangani dengan tambang berskala kecil. Pada tahun 1923 tambang kecil berjumlah 213 buah, sedangkan tambang skala besar 76 buah. Pemakaian mesin uap perlahan telah menggeser kebutuhan kuli, jumlah instalasinya bahkan terus meningkat. Sarana kereta api terdapat di Blienyu, Sungailiat dan Pangkalpinang dengan panjang rel 86 km. terdapat 19 lokomotif aktif dengan 358 gerbong angkut.

Di masing-masing distrik terdapat pusat peleburan timah sendiri; Mentok, Belinyu, Pangkalpinang, Sungailiat dan Toboali. Pada bulan Juni 1923 di Pangkal Balam, Pangkalpinang dibangun pusat peleburan timah yang besar yang mempunyai fasilitas tanur (*oven*) dan pendingin air (*watermantle oven*). Pada tahun 1928 di daerah Payung (Bangka Selatan) juga dibangun peleburan timah untuk melebur timah di kawasan tersebut. Meskipun sudah mempunyai tempat peleburan timah sendiri, sejak tahun 1923, banyak timah Bangka yang dilebur di Starits Trading Company di Pulau Berani, Singapura. Dalam sebuah laporan juga tercatat bahwa 50% produksi Blinyu tahun 1922-1923 dikirim ke Singapura untuk dilebur di sana.

Semakin menipisnya cadangan alluvial, telah menggerakkan kegiatan pencarian cadangan timah baru diseluruh Bangka. Penemuan peralatan Bor Bangka sebagai peralatan yang praktis telah memungkinkan eksplorasi dilakukan secara cepat dan luas. Pada tahun 1918 di Bangka terdapat 78 regu bor, yang terdiri 895 orang Tionghoa dan 159 orang Melayu. Jumlah cadangan timah di Bangka pada 1 Maret 1919 adalah 2.422.631 pikul. Pada tahun 1925, tercatat cadangan yang dibukukan mencapai 5.010.188 pikul. Walaupun sasaran pencarian cadangan timah masih pada cadangan dangkal untuk kolong, namun pada awal tahun 1900-an, menurut catatan data eksplorasi telah diketemukannya cadangan timah jenis baru. Pencarian cadangan timah kulit tang baru telah menemukan cadangan timah primer. Di Koba, juga ditemukan urat timah di sungai Belawi yang kemudian dilakukan penelitian lanjutan. Ada dugaan ini adalah

jenis urat besi bertimah seperti yang ditemukan di Belitung. Jenis yang sama di bukit Pelalawan Koba, dalam skala kecil telah di tambang.

Di Bukit Baji (Koba) ditemukan penggalian lama sumur Palembang, dengan indikasi timah primer. Di Bengkuang ditemukan urat timah yang mengandung wolframit. Sementara di Pangkalpinang timah primer ditemukan di Langgir hulu sungai Pedindang. Pada tahun 1918 cadangan timah primer di Sambunggiri dan Merawang telah melewati proses eksplorasi. Di Blinyu, timah primer ditemukan dan kemudian ditambang pada tahun 1917. Sejarah mencatat penelitian timah primer terus berlanjut sampai pertengahan abad 20 yang menghasilkan kurang lebih 100 lokasi timah primer di Bangka. Memasuki abad ke 21, penelitian timah primer makin intensif dilakukan Karena semakin berkurangnya prospek deposit timah alluvial.

Pencarian cadangan timah kolong dan kemungkinan terdapatnya lapisan timah alluvial pada tempat yang lebih dalam, yang dikenal dengan alluvial dalam. Di Koba, pengeboran pada tingkat kedalaman 30m masih belum ditemukan indikasi lapisan timah. Di Belinyu, pada tahun 1917 dilakukan delapan pengeboran dengan jumlah mencapai 656 m, pada lubang ke delapan dengan kedalaman 80m. di daerah Air Saga, ditemukan timah alluvial pada kedalaman 50m. Pencarian cadangan timah terus dilakukan di daerah pasang surut atau laut dangkal.

Kapal keruk (KK) pertama yang beroperasi di Bangka adalah kapal keruk Diniang yang mengawali operasinya di lembah Diniang, Sungailiat pada tanggal 23 Agustus 1923. Kapal buatan Conrad ini

mempunyai ukuran mangkuk 7 cuft (*cubic feet*) dengan kedalaman gali 10m. namun pada masa awalnya, KK Diniang banyak mengalami masalah, dan produktifitasnya sangat rendah. KK Toboali, yang merupakan KK kedua di Bangka malah mempunyai produktifitas yang lebih baik. KK ini didatangkan dari Batavia pada tahun 1928. KK ini awalnya berfungsi sebagai penggali lumpur atau disebut *Weltevreden (Koningsplein)*. KK ini di desain oleh J.S Volker dan dibangun di falanagn J & K Smith (IHC) tahun 1926. Sebelum ditarik ke Bangka, KK ini di tarik ke dok-yard pelabuhan Sabang-Aceh, digunakan untuk KK tambang yang mampu menggali sampai kedalaman 20m. KK ini pertama kali beroperasi di Bangka, di Toboali, yang kemudian dinamakan KK. Toboali.

Sampai tahun 1938, tercatat telah ada 8 KK yang beroperasi di Bangka. 4 KK diantaranya digerakkan oleh mesin uap, dan 4 KK lainnya dengan listrik yang dialirkan dari darat. 7 dari KK berukuran sama, yakni berkapasitas 3 juta M3 per tahun, ukuran mangkuk 9 cuft dan kedalaman keruk 18-21m. Karena kemudian ditemukan cadangan timah yang lebih dalam lagi, maka pada tahun 1930 dibangun lagi sebuah KK yang lebih besar dengan ukuran mangkuk 15 cuft dengan kedalaman gali 28m. KK ini diberi nama Ayer Kantong, karena menangani cadangan di Air Kantong. Sayangnya, saat penarikan dari Inggris ke Bangka, kapal ini tenggelam dihantam, badai besar di selat Cannal, Inggris. Sebagai gantinya, pada tahun 1938 dibangun KK Sungailiat dengan ukuran mangkuk 14 cuft, dengan kedalaman gali 28m. KK ini dibangun di Surabaya, untuk menghindari kejadian serupa saat penarikan dari Eropa, seperti yang dialami KK Ayer Kantong.

Pada saat pendudukan Jepang di Bangka, Belanda menenggelamkan kapal-kapal keruk dalam air dangkal 4-6 meter, sehingga mudah diapungkan kembali. Kapal-kapal keruk tersebut ditenggelamkan di daerah operasinya. KK Surabaya di ir Mengkubung, Blinyu. KK Toboali di lembah Toboali, KK Rambat di lembah Rambat, Mentok. KK Plaben di Air Mangkok, Pangkalpinang. KK Tempilang di Tempilang. KK Klanci di Air Kelanci. KK Sungailiat di Air Kantung. Dan KK Diniang di Air Diniang, Sungailiat.

Sementara kolong-kolong tambang darat dibiarkan terendam air, sedangkan perlengkapannya dibuang ke sungai terdekat. Di Belinyu, persediaan gudang untuk listrik Mantung dibuang di sungai Blinyu. Timah hasil tambang, baik yang berupa pasir timah maupun logam timah disembunyikan dengan berbagai cara, antara lain dengan dibuang kembali ke kolong-kolong. Beberapa muatan timah dengan sengaja ditenggelamkan di laut yang lokasinya di tandai di peta.

Ketika Jepang datang, orang-orang BTW dipaksa mengaktifkan kembali kapal-kapal keruk tersebut. Beberapa diantaranya berhasil dioperasikan kembali dan berproduksi, tetapi akhirnya berhenti beroperasi karena kehabisan suku cadang. Timah-timah yang dibuang disungai dan laut dipaksa untuk diambil kembali. Jumlah total yang berhasil diambil mencapai 472 ton.

Pada masa pendudukan Jepang, penanganan penambangan timah di Bangka, Belitung dan Singkep diberikan pada sebuah perusahaan swasta Jepang, *Mistubishi Kogyo Kaisha* (MKK) dibawah pengawasan militer Jepang. Jumlah pekerja MKK pada saat itu 47

orang. Dari laporann MKK, pada tahun 1945 sebuah kapal Jepang yang memuat 283 ton timah batangan ditenggelamkan oleh pesawat sekutu. Dan kapal Sing Ho ditenggelamkan muatan 100 batang timah di Pelabuhan Mentok.

Ketika tentara sekutu mendarat di Mentok, mereka meminta pada militer Jepang untuk membuat laporan produksi timah Bangka Belitung selama pendudukan Jepang. Laporan tersebut disusun oleh MKK di Pangkalpinang. Pada tahun 1945m produksi timah selama 3,5 tahun pendudukan Jepang, baik yang berasal dari tambang darat, kapal keruk maupun timah temuan (yang dibuang Belanda) mencapai 32.790 ton, dengan rincian di Bangka 27.712 ton dan Belitung 5.078 ton. Pada akhir peperangan tahun 1945, kegiatan penambangan nyaris terhenti karena kekurangan suku cadang akibat peralatan permesinan dan listrik dibawa keluar Bangka untuk kepentingan perang.

Pada awal tahun 1942 di Bangka masih beroperasi 53 tambang (mentok 11, Blinyu 14, Sungailiat 15 dan Pangkalpinang 13 dengan jumlah produksi sekitar 2.394 ton konsentrat. Sementara pada tahun 1945 hanya ada dua tambang yang beroperasi dengan jumlah produksi 336 ton. Selama masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945, jumlah roduksi timah sekitar 5.087 ton.

Sedangkan di Belitung, pada tahun 1943 tercatat 23 tambang yang beroperasi dengan produksi 633 ton. Maka di tahun 1945 jumlah tersebut mengalami penurunan, dengan menyisakan 6 tambang dengan produksi 51 ton. Berbeda dengan Bangka, di Belitung dibuka

tambang-tambang kontrak atau *patrikeleur leverensier* (PL) yang selama 4 tahun¹¹ menghasilkan 1.460 ton. Jumlah keseluruhan hasil tambang yang beroperasi pada masa pendudukan Jepang dan penemuan timah yang dibuang Belanda adalah 3.052 ton.¹²

Pada masa pendudukan Jepang, kapal keruk yang ditenggelamkan dipaksa untung diapungkan kembali dan dioperasikan oleh Jepang, tetapi tidak semua berhasil. Adapun kapal keruk yang tidak bisa diapungkan lagi, baru dapat diapungkan kembali pada tahun 1946 ketika Bangka kembali ke tangan Belanda. KK yang dapat diapungkan antara lain: KK Toboali, KK Plaben, KK Tempilang. Dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengapungkan kembali KK Plaben, sedangkan KK Diniang setelah diapungkan dipreteli untuk mengisi kebutuhan suku cadang. Pada tahun 1943, Di Bangka hanya terdapat 9 KK yang dapat beroperasi kembali.pada tahun 1943, total ada 10 kapal yang bekerja. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 1944, dimana kk yang beroperasi tinggal 8 KK, jumlahnya terus menurun sampai tahun 1945, dimana hanya tersisa 4 KK. Sedangkan di Belitung hanya dapat 2 KK yang beroperasi. Pada waktu kekuasaan kembali ke tangan Belanda tahun 1956m ditemukan stok timah di gudang sebanyak 3.095 ton balok timah dan 4,986 ton bijih timah.

¹¹4 tahun terhitung mulai dari tahun 1942-1945 (data tahun 1942 tidak diketemukan).

¹² Sutedjo Sujitno, 2015. *Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. (Jakarta: PT. Timah (Persero) Tbk.)

Pada tahun 1949, bersamaan dengan penyerahan kedaulatan ke tangan Republik Indonesia, tambang timah Bangka dikuasai sepenuhnya oleh Negara dan kemudian dinamakan Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka. Dengan manajemen masih dipegang oleh GMB sampai kontrak mereka habis.

Tingkat produksi timah Indonesia sejak tahun 1957 menunjukkan kemerosotan yang mengejutkan di tahun 1950. Pada tahun 1963 penurunan itu sangat mencolok, dimana produksi yang dicapai hanya 12.947 ton, atau 36% dari produksi tahun 1954 yang berjumlah 35.861 ton. Padahal antara tahun 1950-1960, Indonesia menempati ranking kedua dalam produksi timah dunia. ada beberapa factor yang mempengaruhi merosotnya produksi timah, antara lain:

- Turunnya kadar kekayaan cadangan yang tersedia
- Kapal keruk yang rata-rata berumur tua
- Kekurangan tenaga ahli kapal-kapal keruk
- Tenaga kerja baru belum berpengalaman
- Kekurangan suku cadang dan devisa

Dalam perkembangannya, penggunaan logam timah dunia pada tahun 2000-an, sekitar 254.000 ton. 90% produksi timah ini berasal dari kawasan Asia (Tiongkok, Indonesia, Malaysia dan Thailand), Australia, Amerika Latin (Brazil, Peru, Bolivia). Sisanya sekitar 10% berasal dari Afrika, Eropa Timur, Eropa Barat dan Ameriak Serikat. Sejak tahun 2000, tercatat kenaikan nilai produksi tambang timah skala kecil di Tiongkok dan Indonesia (TI).

Cadangan timah Indonesia memang semakin menipis. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan produksi, menyediakan cadangan nasional masa depan, sekaligus menggunakannya untuk mengendalikan harga. Salah satu yang penting adalah membatasi dan menetapkan batas maksimum atau kuota produksi timah nasional setiap tahun, misalnya 75.000 ton per tahun. Ini perlu dilakukan terutama untuk pengendalian harga dan proteksi kebutuhan jangka panjang dalam negeri. Pemerintah harus berupaya mengantisipasi habisnya sumber daya timah dengan pengaturan regulasi. Misalnya, jalur ekspor harus dari satu pintu, yakni PT Timah yang telah ditunjuk sebagai BUMN yang menggarap sektor ini, termasuk mengembalikan eksplorasi hanya kepada PT Timah. Kemudian, PT Timah lebih fokus mengatur kuota produksi dan menghadapi persaingan produsen timah dari negara lain di pasar internasional. Penegakan hukum dan penerapan sanksi juga sangat penting untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam industri timah nasional. Indonesia kini merupakan negara produsen timah terbesar ke-2 di dunia, setelah Cina sebagai produsen terbesar pertama. Indonesia merupakan negara eksportir timah nomor satu di dunia, lebih dari 90% produksinya diekspor ke mancanegara.

Dalam laporan *US Geological Survey* tahun 2009, cadangan timah di seluruh dunia diperkirakan sebesar 11 juta ton. Jika dikomparasikan dengan empat negara-negara penghasil timah terbesar di dunia, cadangan timah Indonesia saat ini adalah yang paling sedikit. Negara dengan cadangan terbesar adalah Cina sebanyak 3

juta ton, Brasil 2,5 juta ton, Peru 1 juta ton, dan Indonesia 0,9 juta ton. Dalam konteks ini, pemerintah belum menyeimbangkan aspek-aspek pendapatan negara dan reservasi atau pengamanan cadangan. Penambangan produksi timah dilakukan hanya berdasarkan upaya untuk mengejar pertumbuhan dan peningkatan pendapatan.

Bab IV Pola Perdagangan

Perdagangan timah di jalur pelayaran India Timur – Asia Tenggara dan Cina, telah ramai sejak masa awal Sriwijaya di abad ke-7. Pelabuhan-pelabuhan Cina bagian Tenggara, seperti Amoy dan Canton, merupakan pelabuhan besar yang berhubungan dengan kapal-kapal asing. Berdasarkan catatan pedagang Arab pada abad 9, timah telah diekpor dari tempat yang sekarang bernama Kedah di Malaysia (Sutejo, 2007: 144). Posisi Belanda dalam perdagangan timah di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih kuat, setelah VOC menguasai Malaka dan Portugis pada tahun 1641. Namun memasuki awal abad ke-18 posisi monopoli Belanda mendapat tantangan berat dari saingannya sesama bangsa Eropa. Tantangan juga datang dari raja-raja negeri penghasil timah di kawasan Asia Tenggara. Bahkan juga pemerintah Cina di masa Dinasti Kangxi, pernah melarang hubungan dagang dengan Belanda. Larangan ini berlangsung dari tahun 1717-1722 yang mengakibatkan timah VOC menumpuk tak terjual di gudang Batavia.

Dalam perkembangannya, Cina mengalami masa kemakmuran pada era Dinasti Qianlong yaitu pada periode 1735-1795. Pada masa itu, Cina pertama kali menggunakan uang logam yang mengandung timah putih (5%), yang kemudian sangat berpengaruh sebagai alat jual beli di kawasan Nusantara. Karena kebutuhan timah yang meningkat, pada tahun 1780-an, didatangkan

timah dari Cornwall karena kekurangan pasokan dari Thailand, Malaya dan Indonesia.

Memasuki awal abad ke-18, timah Bangka mulai dipasarkan. Dalam dokumen surat menyurat tentang pembelian timah dari Sultan Palembang yang terdapat dalam *Rykarchief* di Gravenbage, negeri Belanda, diketahui bahwa di tahun 1717 untuk pertama kali timah yang diperdagangkan selama itu berasal dari Pulau Bangka. Surat itu yang berupa laporan tertanggal 9 Maret 1717, ditulis oleh I. Panhuijs dan H. Verburg dari loji VOC di Palembang ditujukan kepada Christophel van Swoll, Gubernur Jenderal di Batavia. Tentang hal inilah yang dipertanyakan Hovic, bagaimana mungkin VOC selama hampir seratus tahun tidak mencurigai bahwa timah yang diperolehnya lewat Sultan Palembang berasal dari Bangka (Sutejo, 2007: 145).

Ikatan jual-beli timah antara VOC dan Sultan Palembang telah dituangkan dalam *Contract van verbintnisse en alliantie* (Perjanjian mengenai jaminan dan Persekutuan), tertanggal 10 Juli 1668, yang sebenarnya memperkuat perjanjian-perjanjian yang sudah ada sebelumnya yakni dari tahun 1641,1642 dan 1662. Namun, terlepas dari perjanjian itu, timah juga sengaja dibiarkan lolos oleh Sultan Palembang untuk diselundupkan ke Lingga. Timah selundupan dari Bangka ini dijual ke pedagang-pedagang Inggris ataupun dijual langsung ke Cina. VOC kemudian mendesak Sultan untuk memperbaharui ikatan perjanjian pada tahun-tahun berikutnya, antara lain, pada tahun 1678, 1681, 1691, 1722,1755,1763,1777 dan 1791.

Memasuki abad 20, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan kontrak dengan *De Nederlandsche Handelmaatschappij* untuk menyelenggarakan penjualan timah dari Indonesia. Untuk itu diberikan komisi sebesar $\frac{1}{4}$ % dari penjualan kotor. Suatu penghasilan yang besar mengingat omzet penjualan jumlahnya sangat besar dan langgeng. Timah dari Bangka dikirim ke negeri Belanda untuk dijual di loji-loji penjualan umum. Pada masa Perang Dunia I, pengiriman sempat terhenti karena tidak terjaminnya keamanan sehingga pengapalan tidak dapat dilaksanakan. Setelah berakhirnya perang, kontrak diperpanjang untuk 5 (lima) tahun lagi dan berakhir pada tahun 1925 (Sutejo, 2007: 146).

Setelah berakhirnya kontrak pada tahun 1925, dibentuk kantor resmi *Verkooperkantoor voor.s Lands Mijnbouwproducten* yang berkedudukan di Den Haag. Kantor ini melaksanakan strategi pemasaran sesuai dengan kondisi pasar Internasional. Strategi dasarnya adalah upaya memasarkan timah langsung pada konsumen untuk menghindari perantara. Kemudian pada tahun 1949, *Verkooperkantoor voor.s Lands Mijnbouwproducten* berganti nama menjadi Kantor Penjualan Hasil Tambang Negeri, baik untuk kantor di Jakarta maupun di Den Haag.

Sembilan tahun kemudian, hubungan politik Indonesia-Belanda mulai menghangat sehubungan dengan perjuangan pengembalian Irian Barat (TRIKORA) pada tahun 1958. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan perdagangan timah, maka didirikan kantor *European Office of The Mining Directorate of the Republic of Indonesia* yang terkenal

dengan singkatan EOMIN, berkedudukan di London. Pendirian ini bertujuan untuk mengantisipasi efek politis yang mungkin dihadapi dalam tata jual timah Indonesia. Untuk sementara waktu Kantor Penjualan Hasil Tambang Negeri yang berkedudukan di Den Haag tetap menjalankan tugasnya, sampai kemudian terjadi pemutusan hubungan diplomatic dengan Belanda pada tahun 1960. Kegiatan kemudian dipindahkan ke Antwerpen, Belgia. Pada waktu itu, kantor tersebut diubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas Penjualan Hasil Tambang Indonesia (Sutejo, 2007: 146). .Dalam perkembangannya, tahun 1961, didirikan BPU Timah, Kantor Penjualan ini dilebur sebagai Biro Penjualan di bawah BPU Timah.

Pada tahun 1960, seluruh perusahaan pertambangan timah disatukan dibawah PN. Tambang Timah. Sedangkan beberapa pertambangan yang memiliki produksi relatif kecil, beraa langsung dibawah pengawasan langsung PN. Timah walaupun tidak termasuk dalam struktur organisasinya. Produksi timah Indonesia pada tahun 1966 mencapai titik terendah sepanjang satu abad terakhir, kecuali di masa pendudukan Jepang dimana hanya dihasilkan 1.067 ton. Masih kalah dengan produksi tahun 1941 sebesar 54.320 ton atau sekitar 23.54%, dibandingkan dengan produksi tahun 1956 sekitar 42.54 %. Kontribusi timah dalam penerimaan devisa Negara adalah sekitar 7%. Sampai tahun 1964, timah dapat membuka lapangan kerja bagi 28.500 tenaga kerja. Pada tanggal 29 September 1965, kapal keruk pertama yang khusus untuk penambangan timah di laut resmi diluncurkan, oleh Bung Karno kapal keruk tersebut dinamakan BANGKA-1. Kapal keruk ini mulai beroperasi April 1966 di perairan Air

Kantung, 3 km dari pantai. Kapal keruk ini pada akhirnya menjadi kapal keruk offshore yang tangguh dan menempatkan timah Indonesia sebagai pelopor penambangan timah dilaut di masa itu dan masa-masa sesudahnya.

Pada masa orde baru, seakan membuka harapan baru bagi pertambangan timah. Dalam jangka waktu 5 tahun laju inflasi dapat ditekan hingga 8%. Penerimaan export yang semula hanya US\$ 500 juta naik menjadi US\$ 1000 juta. Sumber devisa utama Indonesia berasal dari ekspor minyak bumi, karet, kopi dan timah yang memberikan kontribusi sebesar 73% dari total pendapatan ekspor. Diluar minyak bumi, timah menunjukkan kenaikan yang cukup mengesankan dalam 5 tahun pertama orde baru. Pemerintah orde baru membuka babak baru bagi pengembangan perekonomian Indonesia yang digariskan pada suatu rumusan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Hal ini dituangkan dalam ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 pada bulan Juli 1966. Inti dari ketetapan tersebut adalah perlu digali dan diolah kekayaan potensial yang terdapat di alam Indonesia.

Setelah adanya kenaikan harga timah sejak 1968-1970, produksi timah dunia akhirnya dapat meningkat meskipun dengan susah payah. Pada tahun 1972 produksi timah mencapai 196.500 ton, sementara konsumsi tercatat 190.00 ton. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara *supply* dan *demand* di pasar. Sejak tahun 1968, Bangka yang terkenal sebagai penghasil utama timah Indonesia (60%) telah mengalami penurunan kekayaan gali dari 4.77 kw/100 M³ hingga titik terendah 3.65 kw/1000 M³ di tahun 1971. Untuk

meningkatkan produksi, PN. Timah memanfaatkan penemuan cadangan-cadangan laut yang baru dan lebih kaya. Maka beberapa kapal keruk di Belitung dipindah operasikan di perairan Bangka.

Pada akhir tahun 1979 sampai awal tahun 1980 pasokan timah dunia melebihi permintaan, sementara kebutuhan timah masih menurun. Pada tahun 1985 harga timah jatuh. Pasar timah kelebihan persediaan, untuk beberapa tahun terjadi ketidakseimbangan sehingga menekan harga. Ada beberapa penyebab jatuhnya harga timah, antara lain: masalah struktural, turunnya kurs £ terhadap US \$, dan penyelundupan. Dimasa awal persero PT. Timah pada tahun 1986, setelah jatuhnya harga timah, terjadi penghapusan pembatasan ekspor yang membatasi tingkat produksi. Keputusan untuk tidak mengurangi karyawan dan tidak meneriam karyawan baru, harus diimbangi dengan ditingkatkann nilai kekayaan cadangan digali. Akibatnya antara tahun 1985-1987 kekayaan cadangan yang digali meningkat 50%. Penambangan digeser ke laut dengan kapal keruk yang lebih rendah biaya produksinya. Dan dengan kekayaan cadangan timah laut yang tinggi, unit-unit tambang semprot yang berbiaya mahal dikurangi. Dengan cara ini perusahaan meningkatkan produksinya dan menjual lebih banyak lagi. Bangka merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia, yaitu meliputi 60% dari seluruh produksi Indonesia. Angka ini seharusnya bisa lebih tinggi lagi, mengingat ada beberapa kapal keruk dari unit Belitung yang dioperasikan di daerah Bangka.

Berbeda dengan situasi pertambangan timah di Thailand dan Malaysia, di Indonesia harus dipertahankan karena Indonesia memiliki

cadangan timah yang besar. Data dari USBM mencatat cadangan timah Indonesia menduduki 5 besar, bahkan berada di urutan kedua setelah Malaysia. Produksi timah Indonesia, khususnya Bangka sudah sangat terkenal di dunia lebih dari 100 tahun karena keunggulan kualitasnya (tingkat kemurnian tinggi). Perusahaan pertambangan timah Indonesia sepanjang sejarahnya sebagai produsen sanggup memberikan supply secara tetap dan pasti kepada para pelanggannya. PT. Timah telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 150 tahun sehingga memiliki karyawan yang potensial dan juga memiliki peralatan dalam jumlah kapasitas yang besar untuk menjaga kelangsungan produksi. Kehadiran pertambangan timah yang lebih dari 150 tahun di Bangka-Belitung tentu mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan sosial-ekonomi daerah ini.

Secara umum, sejak timah Bangka memasuki pasar Eropa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, timah Bangka mempunyai keunggulan komparatif. Memasuki tahun 1990-an, negara konsumen utamanya adalah Amerika, Inggris, Jepang, Jerman Barat dan Perancis. Dalam kontrak penjualan dicantumkan ketentuan bahwa Banka Tin yang dibeli tidak boleh di re-export. Namun demikian, pemasaran PT. Timah disederhanakan yaitu dilaksanakan oleh Kantor Pemasaran Pangkalpinang, Indometal New York dan Indometal London. Sementara itu, Kantor Perwakilan Singapura ditutup terhitung tanggal 31 agustus 1991 (termasuk Batam). EOMIN di Antwerpen ditutup terhitung 6 Maret 1992.

Pengguna timah yang terbesar ialah pabrik alat-alat elektronik. Patri yang menghubungkan komponen-komponen dalam

gawai dan komputer dan televisi dan pendingin udara hampir seutuhnya terbuat dari timah. Produksi riil timah Indonesia pada 2013 dan 2014, menurut British Geological Survey, adalah 88,4 dan 70,2 ribu ton. Artinya, sebagian besar timah Indonesia berasal dari Provinsi Bangka Belitung.

Timah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Bangka Belitung. Sebagian besar kehidupan sosial ekonomi masyarakat menggantungkan nasibnya pada penambangan timah ini. Namun, penambangan rakyat kini sudah tersisihkan. Masyarakat diminta untuk beralih ke sektor lain sebagai mata pencahariannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS): 83,6 persen dari keseluruhan ekspor Provinsi Bangka Belitung pada Agustus 2016 adalah timah, dengan nilai (*freight on board*) 77,6 juta dolar Amerika Serikat atau 1,009 triliun rupiah. Melemahnya perekonomian di Bangka Belitung akibat pengetatan regulasi pertimahan yang diperburuk anjloknya harga timah dunia hingga kisaran US\$ 16 ribu per metrik ton membuat seribu lebih karyawan swasta terpaksa menerima pemutusan hubungan kerja (PHK).

PHK paling banyak terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan timah. Namun karena ketergantungan Bangka Belitung terhadap timah tinggi, sektor ekonomi lainnya terpengaruh.¹³ Hingga saat ini (2016) lebih dari seribu karyawan sudah menerima PHK akibat lesunya perekonomian Bangka Belitung. Paling banyak

¹³ Disebutkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bangka Belitung Darusman dalam sebuah media.

sektor pertambangan. Ada juga dari perusahaan perkebunan, seperti sawit dan karet. Perusahaan perhotelan dan jasa juga ikut mem-PHK karyawan.

Gelombang PHK diprediksi berlanjut jika harga timah tidak kunjung membaik. Pemerintah harus mampu mendorong kembali naiknya perekonomian masyarakat. Paling tidak melakukan pengawasan secara ketat kepada perusahaan yang melakukan PHK serta mendorong perusahaan melakukan efisiensi tanpa harus melakukan PHK . Hal ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2000-an dimana setiap tengah malam di kota-kota kecil di Kepulauan Bangka Belitung, mobil-mobil tua berbaris untuk mengisi bahan bakar. Menjelang siang mereka berpencar dan mulai mengangkut solar ke pelbagai tempat. Bahan bakar diesel itu kemudian berpindah ke tambang-tambang timah kecil yang dikelola oleh rakyat kebanyakan. Namun saat ini, mobil-mobil tua ini tidak lagi terlihat karena berhentinya operasional tambang timah rakyat kecil.

4.1. Konflik Timah di Bangka Belitung

Konflik yang melibatkan masyarakat dalam memperebutkan komoditas timah sebagai bahan galian golongan A ini sudah muncul sejak berabad-abad lampau. Iskandar Zulkarnain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat, konflik memperebutkan komoditas timah di Bangka Belitung ini pada dasarnya telah terjadi sejak abad ke-18. Pada saat-saat tertentu intensitas konflik antarpihak

meningkat, membuat simpul-simpul persoalan, sehingga menimbulkan gejolak dalam masyarakat.¹⁴

Tidak ada catatan pasti sejak kapan timah sebagai komoditas bernilai ekonomis ditemukan di Bangka dan Belitung. Hanya disebutkan, sejarah penambangan timah di dua Pulau ini sudah melewati masa yang cukup panjang, jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda—melalui Kesultanan Palembang—memonopoli perdagangan timah dari daerah ini pada awal abad ke-18.

Konflik Timah di Bangka Belitung memuncak pada tanggal 5 Oktober 2006. Kejadian itu diikuti oleh perusakan Kantor Gubernur Bangka Belitung di kawasan Air Itam, Pangkal Pinang. Ribuan orang yang bergantung hidupnya pada penambangan timah di lokasi tambang inkonvensional (TI) dan atau pekerja di industri peleburan timah di Pulau Bangka mengamuk karena hak hidupnya merasa diganggu. Kronologis peristiwa ini bermula sejak awal Oktober 2006, polisi melakukan operasi penutupan pada sedikitnya 84 usaha tambang timah rakyat, menyita peralatan tambang, serta menahan belasan warga. Polisi juga menutup tiga industri peleburan timah (*smelter*) yang menampung pasir timah rakyat. Aksi protes ke Markas Kepolisian Daerah Bangka Belitung bukan saja tidak membuahkan

¹⁴ Lihat dalam Iskandar Zulkarnain. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi* (LIPI Press, 2005: 67).

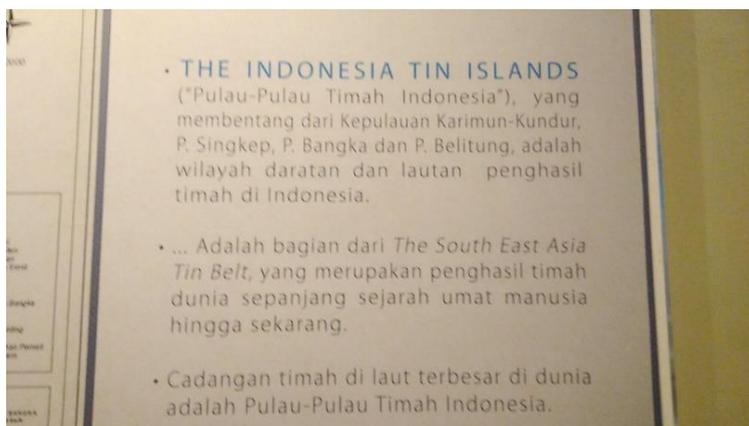
hasil, malah berbuntut kericuhan sehingga menyulut kemarahan lebih luas. Esoknya, sasaran kemarahan beralih ke pusat pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.¹⁵ Catatan hitam ini hanya ingin memperlihatkan betapa isu menyangkut timah sangat rawan memicu konflik.

4.2. Timah Dalam Kontrol Pemerintah

Menurut sejumlah survey geologis tahun 2015, cadangan bijih timah terukur di Indonesia adalah yang terbanyak kedua di dunia, 800 ribu ton, dan pada 2014 hasil penambangannya setara 19,77 persen dari produksi global. Pemilik cadangan dan penghasil timah terbesar saat ini, Cina, lebih banyak memanfaatkan hasil tambang itu untuk kebutuhan industri dalam negerinya. Maka, Indonesia yang berjualan timah batangan, timah patri atau solder, dan olahan dasar lainnya

¹⁵ Dalam aksi pada 5 Oktober 2006 tersebut, massa yang marah memecahkan hampir semua kaca jendela, mendobrak pintu, dan merusak mobil-mobil berpelat merah yang terdapat di areal parkir. Sebelumnya mereka merobohkan pagar gerbang kantor, menghancurkan lampu-lampu taman dan hidran yang ada di halaman depan. Setelah menjebol pintu bagian samping kantor, massa berhasil merangsek masuk ruangan dan merusak komputer serta perabot kantor lainnya. Para bupati se-Bangka Belitung dan unsur musyawarah pimpinan daerah yang sedang rapat bersama gubernur (ketika itu masih dijabat A Hudarni Rani) pun harus diungsikan melalui pintu belakang.

(misal: pelat dan pembuluh), sebagian peran penting di pasar dunia. Timah Indonesia juga diyakini “tidak berlumuran darah”, berbeda dari produk Kongo dan negara-negara lain yang sedang dilanda perang. Jurnalis Cam Simpson, dalam laporannya yang diterbitkan Bloomberg pada 2012, mengutip pernyataan sebuah perusahaan penghasil patri: “Membeli timah Indonesia adalah rute yang tepat menuju jaminan bebas konflik.” Dalam koleksi Museum Timah di Muntok, disebutkan bahwa Pulau-Pulau timah di Indonesia adalah Kepulauan Karimun-Kunsur, Pulau Singkep, Pulau Bangka dan Pulau Belitung.



Pulau-Pulau Timah di Indonesia (Koleksi Museum Timah di Muntok)
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

Pada saat ini, pertambangan timah berada dalam control pemerintah secara lebih ketat. Aturan baru yang dimaksud ialah moratorium penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dan pemindahan wewenang pemberi izin tersebut. Seturut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kuasa

kabupaten untuk menerbitkan IUP telah diambil alih oleh provinsi (modal dalam negeri) dan pemerintah pusat (modal asing). Sementara itu diperkirakan ada 15 hingga 50 ribu buruh yang bekerja dan hidup dari tambang-tambang timah di Bangka Belitung. Pemerintah perlu menangani pembagian wilayah di laut, antara Tambang Inkonvensional apung dan kapal isap. Meskipun hal itu sangat rumit. Karena kepentingan tambang bisa bertabrakan dengan nelayan.



Kapal Isap
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

Pada masa Bangka dan Belitung berada di bawah Kesultanan Palembang, di awal abad ke-18, penduduk lokal diposisikan hanya sebagai penonton. Penguasaan akan nilai ekonomi timah (juga lada) di tangan Sultan Palembang. Apalagi, belakangan Serikat Dagang

Belanda (VOC), melalui Sultan Palembang, memonopoli perdagangan timah dari Bangka dan Belitung.

Menyusul kehadiran pekerja tambang yang sengaja didatangkan dari daratan Tiongkok, akses penduduk lokal pada komoditas timah kian dijauhkan. Situasi ini terus berlanjut pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Lebih-lebih setelah timah ditetapkan sebagai komoditas strategis dan kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan oleh penguasa, penduduk lokal semakin dipinggirkan.

Pada masa kemerdekaan pun setali tiga uang. Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Tanah Air, termasuk perusahaan timah di Bangka (1953) dan Belitung (1958), penambangan dan perdagangan timah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah. Kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan penguasa. Tak ada ruang bagi rakyat. Bila ketahuan melakukannya secara diam-diam, rakyat akan dipenjara.

Akan tetapi, di tiap zaman perlawanan selalu ada. Kasus-kasus pelanggaran biasanya muncul ketika warga dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang memuncak, ditandai jatuhnya harga lada dan sebaliknya harga timah melambung di pasaran dunia. Tragisnya, ketika intensitas pencarian pasir timah oleh warga meningkat, penguasa selalu menyikapinya dengan "tangan besi".

Pada awal tahun 1970-an, misalnya, Iskandar Zulkarnain dkk mencatat, penjara Pangkal Pinang sempat penuh sesak oleh para penyelundup timah yang tertangkap. Bahkan, dalam laporan mereka

terungkap, sebuah operasi militer yang dikerahkan pemerintah pusat untuk meredam penyelundupan timah di daerah Belinyu menewaskan sekitar 500 orang. Jumlah ini belum termasuk mereka yang menemui ajal di penjara, yang jumlahnya pun tak kurang dari 500 orang.¹⁶

Pada awal era reformasi muncul fenomena menarik. Seperti terjadi di banyak tempat di Indonesia, ada semacam euforia di kalangan masyarakat Bangka Belitung untuk bisa ikut menikmati keuntungan dari penambangan timah. Munculnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999) yang tidak lagi mencantumkan timah sebagai komoditas ekspor yang diawasi, serta semangat otonomi daerah yang muncul belakangan, segera saja diterjemahkan sebagai "lampu hijau" bagi rakyat untuk ikut terlibat dalam usaha penambangan timah.

4.3. Tambang Inkonvensional

Istilah Tambang Inkonvensional (TI) yang semula merujuk pada Tambang Inkonvensional (TI) bagi mitra kerja PT Timah, yang hanya bisa diakses oleh pengusaha, dalam perkembangannya bergeser menjadi tambang ilegal ketika masyarakat ikut membuka lahan tambang. Hanya dalam beberapa tahun, jumlah TI yang

¹⁶ Episode sejarah pembunuhan massal (terkait soal timah) ini tak pernah diungkap selama masa Orde Baru. Hal itu diungkapkan oleh Iskandar Zulkarnan dkk dalam laporan penelitiannya (2005:60).

berusaha di bekas lokasi kuasa pertambangan (KP) PT Timah sudah mencapai ribuan.

Tahun 2001 saja, Sutedjo Sujitno (2007:290) mencatat ada 5.257 TI di Bangka dan 734 di Belitung. Angka ini belum termasuk TI di luar KP PT Timah, seperti di kawasan hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, atau mereka yang menggali pasir timah di kebun lada dan pekarangan rumah mereka. Jumlah TI terus membengkak, dan di pengujung tahun 2008 diperkirakan sudah mendekati 20.000 buah. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir bermunculan apa yang disebut TI apung, yaitu TI yang beroperasi di perairan sungai dan laut di sekitar pantai Pulau Bangka. Jumlah TI apung kini mendekati 5.000 buah. Sejak kemunculan TI, produksi timah dari Bangka dan Belitung meningkat tajam. Selama tahun 2001, misalnya, produksi TI mencapai 42.000 ton, melebihi produksi PT Timah yang tercatat 40.000 ton. Implikasinya, penyelundupan timah ke luar negeri pun marak terjadi.



**Ilustrasi Kapal Isap di Museum Timah Pangkalpinang
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)**

Pemerintah pusat mulai turut campur mengeluarkan kebijakan karena kehilangan pendapatan dari royalti dan pajak. Sejumlah ketentuan baru ditetapkan, di antaranya larangan mengekspor timah dalam bentuk pasir dan konsentrat. Bagai dendam terhadap sejarah (meminjam ungkapan yang kerap dikemukakan sejarawan Taufik Abdullah), akses yang terbuka lebar itu ternyata juga menebar benih konflik di berbagai tingkatan. Berbagai kasus bermunculan.

Kerusuhan antara penambang timah dan sistem TI apung dan warga desa di Pantai Bubus, Belinyu, akhir Mei 2006, telah menimbulkan bara permusuhan antarwarga. Begitu pun peristiwa rebutan lokasi penambangan TI apung di perairan Kampung Sukadamai, Tanjung Ketapang, Toboali, awal Oktober lalu. Sementara itu, di Belitung, seorang kepala desa di Kecamatan Sijuk terpaksa mengungsi ke Tanjung Pandan lantaran diancam warganya karena tak bersedia mengeluarkan surat rekomendasi penambangan timah bagi mereka. Munculnya sejumlah industri peleburan timah swasta skala kecil, yang menampung bijih timah rakyat dari TI, belakangan juga menimbulkan masalah baru. Kasus penutupan tiga smelter oleh kepolisian, karena diduga tidak membayar royalti, pajak eksplorasi dan eksploitasi, adalah contoh kecil adanya konflik kepentingan antar berbagai pihak.

Ekonomi masyarakat Bangka Belitung memang bertumbuh sejak akses penduduk pada pencarian timah dibuka. Tetapi, konflik antar berbagai pihak yang terlibat dalam memperebutkan rezeki dari keberadaan timah di daerah ini juga terus bermunculan. Di atas

segalanya, konflik yang paling mengerikan dampaknya tentu saja berupa rusaknya bentang alam di dua Pulau ini.

4.4. Ekspor Ilegal dan Timah Batangan

Di Indonesia terdapat 755 perusahaan tambang timah atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP). Namun sebanyak 257 diantaranya belum berstatus Clean and Clear (CnC) dan tidak terkendali.¹⁷ Seluruhnya beroperasi di dua provinsi Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Bangka-Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sedangkan jumlah smelter mencapai 47 berada di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepri.

Perusahaan tambang timah yang tidak berstatus CnC itu diduga melakukan aktivitas ekspor timah ilegal. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2015, timah yang boleh diserap fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) hanya yang berasal dari IUP OP berstatus CnC. Dari jumlah itu, baru 29 smelter yang beroperasi dengan rata-rata kapasitas terpasang 21 Persen sampai 2015. Bahan baku yang digunakan menurut ketentuan, harus berasal dari IUP OP. Atas dasar itu, Mochtar berharap pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait di daerah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang timah di wilayah masing-masing.

¹⁷ Disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mochtar Husein, dalam sebuah media (17/5/2016)

Kegiatan ekspor timah batangan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selama dua tahun terakhir (2015-2016) dipertanyakan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung (Disperindag Provinsi Babel) soal legalitas kegiatan ekspor timah tersebut.

Selama ini ada sekitar dua tahun terakhir ke belakang justru sebagian besar kegiatan ekspor timah batangan tanpa melalui verifikasi dari pihak Disperindag Provinsi Bangka Belitung. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2015 tentang ketentuan ekspor timah, dalam peraturan Menteri Perdagangan itu diantaranya dijelaskan adanya keterlibatan pihak pemerintah provinsi dalam hal pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah namun tidak mengurangi independency surveyor dalam melakukan verifikasi atau penelusuran teknis.

Dalam Surat Edaran Direktur Perdagangan Luar Negeri mengenai aturan ekspor timah, sudah jelas ketentuannya. Namun kenyataan di lapangan selama ini justru menyimpang atau di luar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan itu. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut pernah dilakukan sosialisasi pada tahun 2015 ke sejumlah instansi terkait lainnya termasuk instansi Bea dan Cukai maupun pihak kepolisian di daerah.

Seiring dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan atas peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2015 tentang ketentuan ekspor timah, diperkuat lagi dengan surat keputusan gubernur Babel Nomor 543.1/717/2015, perihal verifikasi ekspor timah. Dalam surat keputusan gubernur tersebut menyatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung sebagai pihak yang ditunjuk langsung guna melakukan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah bersama Surveyor Indonesia dan Sucopindo. Secara lebih rinci, disebutkan bahwa pihak Disperindag Provinsi Bangka Belitung berperan dalam hal proses *smelting* di perusahaan *smelter*.

Bab V Penutup

5.1. Kesimpulan

Bangka Belitung identik dengan timah. Meskipun perdagangan timah di Bangka Belitung mengalami pasang surut, namun timah sulit dipisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Latar belakang sejarah yang telah berurat sejak masa lalu membuat daerah ini sulit berkembang ditopang oleh ekonomi lain. Sekalipun itu lada. Pola perdagangan timah dari masa ke masa dalam kurun waktu abad ke 19-20 selalu berubah menyesuaikan pemegang kekuasaan di Bangka Belitung.

Hambatan terbesar bagi para penambang kecil bukan peraturan, melainkan keberadaan bijih timah itu sendiri. Meski jumlahnya masih banyak, mineral itu kini tidak lagi berada di permukaan. Sedangkan tambang rakyat umumnya hanya dilengkapi peralatan sederhana.

5.2. Saran

Menyikapi perdagangan timah yang semakin menyusut, masyarakat Bangka Belitung sebaiknya lebih megalakkan sahang atau lada putih. Perkebunan lada pernah menjadi mata pencarian utama rakyat. Lada bisa menjadi tulang punggung ekonomi yang lebih baik ketimbang timah. Pernyataan itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS): 83,6 persen dari keseluruhan ekspor Provinsi Bangka Belitung pada Agustus 2016 adalah timah, dengan nilai (freight on

board) 77,6 juta dolar Amerika Serikat atau 1,009 triliun rupiah. Sudah saatnya Bangka Belitung mencari produk pokok yang dapat menggantikan timah. Oleh karena itu sahang adalah pilihan yang menjanjikan.

Sementara itu, lahan yang rusak akibat tambang-tambang timah bisa dihijaukan, kolong atau danau buatan yang telanjur jadi bisa dijadikan sumber air atau tambak. PT Timah telah berhasil melakukan revegetasi pada bekas tambang menggunakan tumbuhan perintis akasia dalam tempo enam tahun.



Bekas Tambang Timah di Bangka
Sumber : Dokumentasi Tim Penulis (2017)

Satu hektare kebun dapat menampung seribu pohon dan dalam kondisi baik, satu pohon bisa menghasilkan dua kilogram sahang setiap kali panen. Kini harga jual sahang (dari petani) sekitar 160 ribu per kilogram. Artinya, mempersiapkan sahang sebagai

pengganti timah ialah kerja yang sangat berat. Selain itu, tetap diperlukan perbaikan di bidang pertambangan timah. Penambang-penambang kecil seharusnya disokong dan dididik—untuk memperkecil risiko kecelakaan kerja dan mengelola lahan bekas tambang secara benar, misalnya—oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, aturan-aturan yang memudahkan pertambangan rakyat juga perlu disusun.

Daftar Pustaka

- Achmad Sahabuddin.dkk (editor).2003. *KePulauan Bangka Belitung*
- Abdullah, Husnial Husin. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka Belitung*, (Jakarta: karya Unipress).
- Budimanta, Arif. *Kekuasaan Dan Penguasaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Penambangan Timah Bangka*, Jakarta: ICSD
- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011): *KePulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- BPS Kabupaten Bangka Selatan (2012): *Bangka Selatan Dalam Angka 2012*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan.
- BPS Kabupaten Bangka Barat (2012): *Bangka Barat Dalam Angka 2012*. Muntok, Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat.
- Bustami Rahman (2011). *Menyoal Penambangan Timah Babel*. Yogyakarta : Khomasa
- Erman, Erwiza (2009). *Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung*, Yogyakarta: Ombak
- Elvian, Achmad (2011): *Kota Kapur Dalam Lintasan Sejarah Bahari. Kota Pangkalpinang*: Penerbit Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang.
- Heidhues, Mary Somers (2008): *Timah Bangka dan Lada Mentok; Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s.d. XX*. Jakarta, Yayasan Nabil.

- Ibrahim, dkk. 2015. *Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Seri III Kajian Melayu Babel. Pangkalpinang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ibrahim, Nirwana Sari dkk (editor).2007. *Koba Dalam Historiografi*
- Mary F. Somers (2008). *Timah Bangka dan Lada Bangka: Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad ke XVIII s/d XX. I* (pen. Asep Salmin, Suma Mihardja). Jakarta : Yayasan Nabil.
- Osberger, R (1962). *Ringkasan Perkembangan Pertambangan Timah*. (pen. D.S. Kamil). Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung.
- Sujitno, Sutedjo (2011): *Legenda dalam Sejarah Bangka; Mencermati Kontribusi Legenda dalam Penyusunan Sejarah Bangka*. Jakarta: Penerbit Cempaka Publishing.
- Sujitno, Sutejo (1996): *Sejarah Timah Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sujitno, Sutedjo (2007). *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad 18 – Abad 20*. Jakarta : Ibalat Communication.
- Sujitno, Sutedjo (2015). *Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: PT. Timah (Persero) Tbk.
- Zulkarnain, Iskandar (2005). *Konflik di Kawasam Pertambangan Timah Bangka Belitung: PErsoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta:LIPI Press

Daftar Informan

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | Drs. Akhmad Elvian |
| Pekerjaan | : | Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pangkalpinang, 14 Oktober 1965 |
| Alamat | : | Jl. Rasakunda Kelurahan Sriwijaya Kec. Gririmaya Pangkalpinang |
- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | Fakhrizal Abubakar |
| Pekerjaan | : | Kepala Museum Timah Indonesia - Muntok |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Muntok, 25 Desember 1956 |
| Alamat | : | Jl. Raya Peltim Muntok |
- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | Bambang Haryo Suseno |
| Pekerjaan | : | Kabid Kebudayaan Bangka Barat |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Muntok, 6 Mei 1981 |
| Alamat | : | Gang Permai No. 10 Pait Jaya Muntok Bangka Barat |
- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama | : | Johan Murod |
| Pekerjaan | : | Pengusaha |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pangkalpinang, 28 Februari 1958 |
| Alamat | : | Kampung Melayu Jl. Nyatoh Pangkalpinang |

5. Nama : Sofyan S
Pekerjaan : Pensiunan PT. Timah
Tempat/Tanggal Lahir : Muntok, 27-08-1950
Alamat : Kampung Teluk Rubiah RT 02 RW
06 Muntok Bangka Barat

6. Nama : Ali Usman
Pekerjaan : PNS di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bangka
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 28 Agustus 1981
Alamat : Jl. Samsuri Salam RT 08 RW 01
Kejaksaan Tamansari
Pangkalpinang

7. Nama : M. Taufik
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 30 April 1973
Alamat : Jl. Batubu Selindung Baru
Pangkalpinang

Lampiran



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 04/M-DAG/PER/1/2007

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan bijih timah dan kegiatan Smelter Timah yang tidak terkendali;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian bijih timah serta perdagangan timah batangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu mengatur ekspor timah batangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2961) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.04/2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan *Pabean Single Administrative Document* di Pulau Batam, Bintan dan Karimun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Timah Batangan adalah timah paduan maupun tidak yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan Pos Tarif/HS 8001.20.00.00
2. Smelter Timah adalah tempat kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah yang dimiliki oleh pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang Kontrak Karya (KK).
3. Eksportir Terdaftar Timah Batangan, selanjutnya disingkat ET-Timah, adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan ekspor Timah Batangan.

4. Kuasa Pertambangan Eksploitasi, selanjutnya disingkat KP Eksploitasi, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksploitasi.
5. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian, selanjutnya disingkat KP Pengolahan dan Pemurnian, adalah kuasa pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian.
6. Kontrak Karya, selanjutnya disingkat KK, adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
7. Surat Perjanjian Kerjasama adalah surat perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang KP Eksploitasi.
8. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang membuat penjelasan mengenai keberadaan, kemampuan dan kelayakan perusahaan untuk melakukan ekspor dan bukan merupakan izin/persetujuan ekspor Timah Batangan.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor Timah Batangan.
10. Menteri adalah Menteri Perdagangan.
11. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
12. Dirjen Minerbapabum adalah Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral.

Pasal 2

- (1) Ekspor Timah Batangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ET-Timah dari Dirjen Daglu.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Bagi Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian:
 - i. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - ii. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - iii. Fotokopi KP Pengolahan dan Pemurnian;

- iv. Fotokopi KP Eksploitasi atau Surat Perjanjian Kerjasama; dan
 - v. Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan.
- b. Bagi Pemegang KK:
- i. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - ii. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - iii. Fotokopi KK; dan
 - iv. Rekomendasi Dirjen Minerbapabum.
- (3) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen Daglu menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan pengakuan sebagai ET-Timah paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Pengakuan sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Bentuk pengakuan sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Timah Batangan yang dapat diekspor oleh ET-Timah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahan baku (bijih timah) yang digunakan berasal dari KP Eksploitasi pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau KK atau KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian Kerjasama.
- b. Memiliki bukti pelunasan royalti untuk Timah Batangan yang akan diekspor.
- c. Memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%.

Pasal 4

Setiap pelaksanaan ekspor Timah Batangan oleh ET-Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 5

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. Memiliki cabang atau jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. asal bahan baku (bijih timah);
 - b. spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS;
 - c. jumlah dan jenis barang;
 - d. waktu pengapalan;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. kadar logam Timah Batangan; dan
 - g. bukti pembayaran royalti yang dikaitkan dengan jumlah Timah Batangan yang diekspor.
- (4) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.
- (5) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Timah Batangan yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya, dari ET-Timah yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor Timah Batangan yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada eksportir.

Pasal 6

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerbabapum dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

- (1) ET-Timah wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerbabapum dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, dan Gubernur setempat setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Timah.
- (2) Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam hal dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya ekspor Timah Batangan
- (3) Bentuk laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengakuan sebagai ET-Timah dibekukan apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah.

- (2) Pengakuan sebagai ET-Timah yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan :
- Telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik; dan/atau
 - Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengakuan sebagai ET-Timah dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - Terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan pengakuan sebagai ET-Timah;
 - Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - Telah mengalami pembekuan pengakuan sebagai ET-Timah sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali.
- (4) Pembekuan, pengaktifan kembali dan pencabutan pengakuan sebagai ET-Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dirjen Daglu.

Pasal 9

Penetapan sebagai pelaksana verifikasi dicabut apabila Surveyor:

- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan/atau
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

**Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007**

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2007

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 04/M-DAG/PER/1/2007
TANGGAL : 22 Januari 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : SURAT PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN.
2. LAMPIRAN II : LAPORAN REALISASI EKSPOR TIMAH BATANGAN

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum

DJUNARI I. WASKITO

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007
Tanggal : 22 Januari 2007

SURAT PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN
NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/ CV..... No. tanggal bulan tahun..... perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....M-DAG/PER/...../2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

EKSPORTIR TERDAFTAR TIMAH BATANGAN (ET-TIMAH)

K e p a d a :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor dan Tanggal KP Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah :
Nomor dan Tanggal KP Eksploitasi atau KK atau Surat Perjanjian Kerjasama :
Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat atau rekomendasi Dirjen Minerabapabum :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
2. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perdagangan dan atau Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.....M-DAG/PER/ / 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai Eksportir Terdaftar Timah Batangan.
5. Surat Pengakuan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.....M-DAG/PER/ / 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan:

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Injen Depdag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Depkeu;
4. Dirjen Minerabapabum;
5. Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat;
6. Kepala Dinas setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
7. Kakarwil Bea dan Cukai setempat.

(.....)

Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007

Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 04/M-DAG/PER/1/2007
Tanggal : 22 Januari 2007

LAPORAN REALISASI EKSPOR TIMAH BATANGAN OLEH ET-TIMAH

Nama Perusahaan ET-Timah :
Alamat Kantor Pusat :
Pengakuan ET-Timah : No Tanggal :

Realisasi Ekspor Timah Batangan Pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan atau Pos Tarif/HS 8001.20.00.00

No	Pos Tarif/HS	Realisasi Ekspor			Pelabuhan Muat	Negara Tujuan Ekspor
		No dan Tgl PEB	Jumlah			
			Volume	Nilai		

Jakarta,.....

PT/ICV.....

(Direktur)

Tembusan :

1. Dirjen Minerbapabum;
 2. Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan setempat.
-

Biodata Penulis:



Anastasia Wiwik Swastiwi

Peneliti Madya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Mulai Bergabung dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau pada tahun 1998. Menyelesaikan pendidikan S1 Sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pendidikan S2 Sejarah di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia dan Pendidikan S3 Pengajian Asia Tenggara juga di Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia.



Sasangka Adi Nugraha

Lahir di Sukoharjo, 22 Juni 1984. Menyelesaikan studi S1 Sejarah di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2008. Mulai berkarir di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau sejak tahun 2009



Hendri Purnomo

Lahir di Tanjungpinang, 8 Oktober 1977. Lulus S1 Program Studi Antropologi Sosial Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002. Tercatat sebagai ASN di BPNB Kepulauan Riau sejak Tahun 2009. Saat ini selain sebagai Peneliti bidang kebudayaan dirinya juga mengemban tugas sebagai Koordinator Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

